

**IMPLIKASI KERJASAMA PT. POS INDONESIA PEKANBARU
DENGAN PENGUSAHA KECIL MITRA BINAAN
MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan
Gelar Sarjana Ekonomi Islam di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



Disusun Oleh:

DYAH RATNA NINGSIH
10525001147

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2010**

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang kerjasama PT. Pos Indonesia dengan pengusaha kecil yang dijadikan mitra binaan oleh PT. Pos Indonesia tersebut. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan PT. Pos Indonesia Pekanbaru dengan pengusaha kecil mitra binaan, implikasi dari kerjasama tersebut terhadap usaha yang dijalankan oleh mitra binaannya dan bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap kemitraan yang dilakukan PT. Pos Indonesia Pekanbaru dalam membina usaha mitra binaannya.

Penelitiannya ini dilakukan di PT. Pos Indonesia Pekanbaru yang berada di Jalan Sudirman Pekanbaru karena lokasi ini mudah dijangkau dan mudah untuk mendapatkan data.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kerjasama yang dilakukan PT. Pos Indonesia Pekanbaru terhadap mitra binaan dalam bentuk seperti apa, dan implikasi dari kerjasama yang dilakukan terhadap usaha yang dijalankan mitra binaannya serta mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap kemitraan PT. Pos Indonesia Pekanbaru dalam membina usaha yang dijalankan mitra binaannya.

Adapun sumber data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Analisa datanya dengan *metode deskriptif kualitatif*. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuesioner dan study dokumentasi.

Setelah penulis menganalisis dari wawancara dan angket dapat diketahui bahwa kerjasama yang dilakukan PT. Pos Indonesia Pekanbaru dengan pengusaha kecil mitra binaan membawa hasil yang memuaskan karena dengan adanya kerjasama tersebut pengusaha kecil merasa terbantu dalam mengembangkan usahanya. Disini diketahui dari jumlah pendapatan yang meningkat dan kondisi usaha yang semakin berkembang dengan adanya kerjasama dari PT. Pos Indonesia Pekanbaru.

Dalam ekonomi Islam, melakukan kerjasama yang menghasilkan keuntungan antara pihak yang bekerjasama dibolehkan dengan prinsip tolong menolong yang saling membutuhkan, saling memerlukan dan saling menguntungkan. Jadi kerjasama yang dilakukan PT. Pos Indonesia Pekanbaru dibolehkan dalam Islam. Namun yang perlu diubah dari kerjasama yang dilakukan PT. Pos Indonesia Pekanbaru adalah ditetapkannya sistem bunga pada pemberian pinjaman kepada mitra binaannya menjadi pembiayaan dengan bagi hasil.

DAFTAR ISI

HALAMAN	JUDUL.....	
	i	
HALAMAN	PENGESAHAN.....	
	ii	
KATA	PENGANTAR.....	
	iii	
ABSTRAK.....		
	v	
DAFTAR	ISI.....	
	vi	
DAFTAR	TABEL.....	
	viii	
DAFTAR	GAMBAR.....	
	ix	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Perumusan Masalah.....	10
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10

D. Metode Penelitian.....

11

E. Sistematika Penulisan.....

13

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil PT. Pos Indonesia Pekanbaru.....

15

1. Sejarah Berdirinya PT. Pos Indonesia Pekanbaru.....

15

2. Visi dan Misi PT. Pos Indonesia Pekanbaru.....

17

B. Struktur Organisasi dan Wewenang serta Tugas PT. Pos

Indonesia Pekanbaru.....

22

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG KERJASAMA, USAHA KECIL DAN KEMITRAAN

A. Kerjasama.....

27

1. Pengertian Kerjasama dalam Islam.....

27

2. Dasar Hukum Kerjasama.....

28

3. Bentuk Kerjasama dalam Islam.....	
30	
B. Usaha Kecil.....	
31	
1. Pengertian Usaha Kecil.....	
31	
2. Jenis-jenis Usaha Kecil.....	
37	
C. Kemitraan.....	
42	
1. Pengertian Kemitraan.....	
42	
2. Jenis-jenis Kemitraan.....	
44	
BAB IV : HASIL PENELITIAN	
A. Bentuk Kerjasama PT. Pos Indonesia Pekanbaru Dengan Pengusaha Kecil Mitra binaan.....	
46	
B. Implikasi Kerjasama PT. Pos Indonesia Pekanbaru dengan Pengusaha Kecil Mitra Binaan.....	
56	
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kemitraan PT. Pos Indonesia	

Pekanbaru dalam Membina Usaha Kecil Mitra Binaan.....

75

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....

80

B. Saran.....

81

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya pengentasan kemiskinan dalam skala nasional merupakan program dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan pada seluruh tingkatan masyarakat di bumi nusantara. Disamping itu, peningkatan sumber daya manusia menjadi prioritas dalam pembangunan nasional pasca kabinet reformasi.

Pengembangan usaha menggunakan sistem waralaba dapat mendorong berkembangnya spesialisasi dan modernisasi usaha tradisional, menumbuhkan kreatifitas dalam mengembangkan inovasi berusaha, sehingga pada gilirannya akan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produksi barang dan jasa indonesia dan dapat meningkatkan efisiensi usaha , distribusi serta nilai tambah dalam aktivitas produksi nasional.¹

Dewasa ini sasaran utama pembangunan diupayakan melalui pelaksanaan berbagai program dan kebijakan pemerintah baik yang bersifat makro sektoral maupun regional. Salah satu dari kebijakan makro tersebut adalah kebijakan perkreditan yang merupakan kebijaksanaan moneter disamping kebijaksanaan-kebijaksanaan lainnya. Dengan demikian, kebijaksanaan perkreditan harus bersifat dinamis sejalan dengan arah dan prioritas pembangunan. Oleh karena itu, kebijaksanaan perkreditan yang ditempuh dalam berbagai tahapan pembangunan sejak pra pelita sampai saat ini memiliki arah dan ciri yang berbeda, sesuai dengan kondisi perekonomian dan perbankan yang pada umumnya termasuk

¹Sunarto, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: AMUS, 2003), hal. 66

kebijaksanaan perkreditan yang ditujukan bagi pembangunan usaha golongan lemah dan kecil.²

Adanya *political will* pemerintah yang kuat untuk mendorong tumbuhnya ekonomi nasional berbasiskan ekonomi rakyat nampaknya perlu disikapi dengan baik, karena paradigma ekonomi konglomerasi yang dijalankan selama ini telah terbukti menyulitkan tumbuhnya ekonomi nasional secara wajar. Walaupun sistem ekonomi kerakyatan belum memiliki konsep yang jelas sebagaimana sistem ekonomi yang dikenal selama ini, bukan berarti sistem ekonomi ini tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pelaku pentingnya adalah usaha kecil dan koperasi.³

Micro finance atau keuangan mikro telah dipercaya menjadi salah satu alat yang paling efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Hal ini diakui oleh pemerintah karena pada tanggal 26 februari 2005 Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan program aksi penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Dengan pemberdayaan UMKM, kemiskinan dan pengangguran di Indonesia dalam lima tahun mendatang dapat berkurang selama masa kepemimpinannya. Pada tahun 2005 itu juga sekaligus ditetapkan sebagai Tahun Keuangan Mikro yang dilatarbelakangi oleh keprihatinan atas besarnya angka kemiskinan diseluruh dunia. Skema

² Kilian Sihombing, *Evaluasi dan Arah Kebijakan Kredit Usaha Kecil Diindonesia (Kumpulan Essai)*, (Jakarta: PLM. FEUI, 1994) hal. 45

³A. Z. Fachri Yasin, dkk, *Petani, Usaha Kecil dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan*, (Pekanbaru: Unri Press, 2001) hal. 59

keuangan mikro diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan dan secara simultan mampu menciptakan masyarakat yang memiliki tanggung jawab, produktifitas tinggi, kemandirian dan martabat serta mengangkat seseorang atau masyarakat.

Kehadiran sektor usaha mikro dan kecil merupakan fakta adanya semangat kewirausahaan ditengah masyarakat kita. Menyadari realitas ini, memfokuskan pengembangan ekonomi rakyat melalui UMKM merupakan hal yang sangat strategis guna mewujudkan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Sejak tahun 1983, pemerintah secara konsisten telah melakukan berbagai upaya deregulasi sebagai upaya penyesuaian struktural dan restrukturisasi perekonomian.⁴ Peranan pemerintah selalu dominan dalam perekonomian bahkan dibeberapa sektor ditemui keadaan monopoli atau oligopoli oleh pemerintah. Kritik menunjukan bahwa hal ini menimbulkan ketidakefisienan dan pembatasan terhadap kegiatan swasta. Hal ini mendorong dilakukannya deregulasi dibidang ekonomi dan khususnya disektor perbankan dan keuangan. Dominasi sub-sektor Badan Usaha Milik Negara, kebijakan pagu kredit dan kredit selektif dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial ekonomi disamping untuk mencapai stabilitas moneter.⁵

Sektor usaha merupakan suatu lapangan bagi kegiatan ekonomi bagi jutaan penduduk indonesia dewasa ini dan masa yang akan datang. Maka tenaga

⁴Mudrajad Kuncoro, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, Edisi. I, (Yogyakarta : BPFE-, 2002) hal. 483

⁵Faried Wijaya, *Perkreditan, Bank dan Lembaga-Lembaga keuangan*, Edisi. I, (Yogyakarta : BPFE-, 1991) hal.71

kerja dan pengusaha yang tergolong rakyat kecil dan lemah dalam berbagai hal, lemah dalam organisasi dan manajemen, lemah dari segi modal dan sebagainya sudah selayaknya mendapat perlindungan dan pembinaan dari pemerintah agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi sesuatu kekuatan dalam pembangunan ekonomi disamping informal.⁶

Usaha kecil adalah kegiatan usaha yang mempunyai modal awal yang kecil atau nilai kekayaan yang kecil dan jumlah pekerja yang juga kecil. Nilai modal awal, aset atau jumlah pekerja itu bergantung kepada definisi yang diberikan oleh pemerintah atau institusi dengan tujuan-tujuan tertentu. Misalnya Indonesia mendefinisikan usaha kecil sebagai perusahaan yang mempunyai pekerja kurang dari 20 orang atau nilai aset yang kurang dari Rp.200.000.000 . Usaha yang terlalu kecil dengan jumlah pekerja kurang dari 5 orang dikatakan sebagai usaha kecil level mikro.⁷

Dalam prakteknya pembiayaan suatu usaha dapat diperoleh secara gabungan antara modal sendiri dengan modal pinjaman. Pilihan apakah menggunakan modal sendiri, modal pinjaman atau gabungan dari keduanya tergantung dari jumlah modal yang dibutuhkan dan kebijakan pemilik usaha.⁸

Usaha kecil mungkin beroperasi dalam bentuk perdagangan ataupun industri pengolahan (*manufacturing*). Usaha berbentuk perdagangan luas ruang

⁶S. Syarif, *Pembinaan Sektor Informal di Indonesia Suatu Bahan Kajian*, (Forum Ekonomi No. 46, 1999), hal. 13

⁷Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 365

⁸Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 86

lingkupnya yaitu mencakup bidang jasa (*service*) yang *intangible* (tidak wujud) sampai dengan menjual barang yang *tangible* (wujud). Usaha kecil berbentuk perdagangan meliputi toko-toko kelontong, pengedar dan penggrosir yang mempunyai toko-toko (*store*) dibangun yang disewa atau dimiliki sendiri.⁹

Dilihat dari segi manajemen, kondisi Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia masih memerlukan pengembangan yang tidak sebanding dengan perannya sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan.¹⁰ Memang cukup berat tantangan yang dihadapi untuk memperkuat struktur perekonomian nasional. Untuk itu, pembinaan pengusaha kecil harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah. Namun, disadari pula bahwa pengembangan usaha kecil menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Lemahnya kemampuan manajerial dan sumber daya manusia mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik.¹¹

Kecakapan bisnis masyarakat dipengaruhi juga oleh kebijakan pemerintahnya. Pemerintah harus menyediakan kesempatan bagi para calon wirausahawan untuk mendapatkan pengalaman bisnis dan mempraktekkan

⁹Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, Edisi I, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 365

¹⁰Gauzali Saydam, *Panduan Lengkap Pengantar Bisnis Dalam Telaah Tanya Jawab*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 62

¹¹Mudrajat Kuncoro, *Ekonomika Industri Indonesia*, (Yogyakarta: ANDI, 2007), hal. .

kewirausahaan. Perusahaan pertanian skala kecil termasuk industri bisa memberikan para pengusaha kecil atau petani pengalaman baru dalam menilai resiko dan peluang mencari keuntungan. Tetapi langkah-langkah yang ditempuh pemerintah di negara-negara berkembang lebih banyak berbentuk pelatihan dan kursus manajemen dan akuntansi.¹²

Untuk lebih meningkatkan produksi dan pengembangan usaha kecil maka pemerintah telah berusaha membantu yang salah satunya dengan cara memberikan kredit seperti Kredit Usaha Kecil atau kebijaksanaan dalam penyisihan laba BUMN sebesar 1-5% guna membina usaha kecil dengan pola kemitraan. Hal ini sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan surat keputusan RI No.316/KMK/016/1994 tentang keharusan bagi BUMN untuk menyisihkan 1-5% dari laba bersih guna membina usaha kecil dalam bentuk kerja sama.

Salah satu Perusahaan yang diberi wewenang untuk memberikan dan menyalurkan bantuan modal bagi para pengusaha kecil adalah PT. Pos Indonesia. PT. Pos Indonesia merupakan perusahaan milik negara yang bergerak dibidang jasa yang merupakan salah satu dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna dapat membantu usaha kecil dan menengah dalam mengatasi permasalahan modal yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah.

Di masyarakat kita ada suatu anggapan yang berkembang dan bahkan sebagian pengamat ekonomi menyatakan bahwa jika kita memberdayakan pengusaha mikro dan kecil berarti yang paling penting diperlukan adalah kredit

¹²Abdul Hakim, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2002), hal. 342

sebagai modal awalnya. Padahal entitas bisnis selalu memerlukan empat faktor produksi yaitu sumber daya manusia, permodalan, tempat usaha dan teknologi. Jadi jika hanya kredit saja yang diberikan berarti hanya salah satu produksi yang diberikan. Belum lagi mengenai masalah manajemen dan pemasaran.¹³

Memberdayakan usaha kecil dan menengah agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya merupakan tujuan dari PT. Pos Indonesia Pekanbaru dalam membina dan menyalurkan bantuan modal kepada mitra binaannya agar dapat mandiri.

PT. Pos Indonesia Pekanbaru tidak hanya memberikan bantuan berupa modal saja kepada pengusaha kecil tersebut namun para pengusaha kecil juga diberikan arahan dan bimbingan dalam bentuk kerjasama untuk mengarahkan usaha yang sedang dijalankan dapat terarah kepada yang lebih baik dan ikut langsung dalam mengatasi masalah apabila pengusaha kecil mengalami masalah dalam mengelola usahanya. Sehingga usaha yang telah dibiayai dengan bantuan modal dari pemerintah dapat terkontrol dengan baik.

Dengan dilandasi seperti yang dicanangkan oleh pemerintah maka usaha industri kecil harus mendapat perhatian yang cukup serius agar apa yang diharapkan dapat tercapai. Pengembangan usaha kecil merupakan topik penting yang perlu dikaji, disempurnakan dan ditingkatkan agar penanganannya lebih

¹³Soetanto Hadinoto, *Kunci Sukses Bisnis Kredit Mikro*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2005), hal. 97

efektif mengingat pula bahwa dengan perkembangannya kemampuan masyarakat dalam mengelola usahanya maka semakin baik pula kondisi sosial ekonominya.

Pembinaan yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru melalui program kemitraan kepada pengusaha kecil diharapkan mampu bersaing dan meningkatkan produktifitas sebagai bagian dari peningkatan produktifitas nasional. Pembinaan dan arahan yang diberikan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru bertujuan untuk mendorong meningkatkan mutu usahanya, memberikan input pengetahuan yang luas tentang usaha dan pengembangannya sehingga usaha yang sedang dijalankan semakin bertambah maju dan banyak memberikan lowongan pekerjaan bagi masyarakat lainnya.

Program kemitraan sebagai salah satu cara yang dapat diharapkan untuk mengatasi kesenjangan tersebut dimana industri kecil diharapkan tidak hanya dapat mengatasi persoalan-persoalan yang mendasar saja melainkan juga semua persoalan yang dihadapi dalam mengembangkan usahanya. Keinginan dan upaya yang baik tersebut memang tidak mudah diwujudkan, namun dengan kesungguhan wirausaha dapat merealisasikan. Namun, perlu disadari bahwa melaksanakan program kemitraan bukan tantangan atau hambatan yang datangnya dari para wirausaha sendiri.¹⁴

Dengan adanya program kemitraan yang dilaksanakan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru diharapkan membawa dampak yang positif bagi perekonomian negara yaitu perekonomian rakyat semakin berkembang khususnya bagi perekonomian pengusaha kecil agar dapat memberikan kontribusi yang baik

¹⁴Tarsis Tarmudji, *Prinsip-Prinsip Wirausaha*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hal. 51

bagi pendapatan masyarakatnya. Dan diharapkan juga menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan semangat kewirausahaan bagi pelaku ekonomi lainnya agar kemiskinan dan pengangguran dapat berkurang sedikit demi sedikit dan menciptakan sistem ekonomi kerakyatan yaitu sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat ke dalam proses pembangunan.

Dari penjelasan diatas, maka penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang pembinaan dan bimbingan yang diberikan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru terhadap pengusaha kecil dalam upaya mengembangkan bisnis usaha kecil di Indonesia khususnya di Pekanbaru serta kebijaksanaan dan keikutsertaan PT. Pos Indonesia Pekanbaru dalam mengatasi masalah-masalah yang dialami oleh pengusaha kecil dalam menjalankan usahanya dan sebab-sebab terjadinya masalah tersebut dalam bentuk kerjasamanya dan bagaimana hasil dari kerjasama tersebut. Dengan demikian, penulis ingin menuangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **“IMPLIKASI KERJASAMA PT. POS INDONESIA PEKANBARU DENGAN PENGUSAHA KECIL MITRA BINAAN MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM”**.

B. Batasan Masalah

Adapun yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai masalah kerjasama PT. Pos Indonesia dengan usaha kecil mitra binaan Kota Pekanbaru dalam mengembangkan usahanya menurut tinjauan ekonomi Islam.

C. Permasalahan

Berdasarkan batasan masalah di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana bentuk kerja sama PT. Pos Indonesia Pekanbaru dengan Mitra Binaannya?
2. Bagaimana implikasi kerjasama PT. Pos Indonesia Pekanbaru dengan pengusaha kecil mitra binaan?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap Kemitraan PT. Pos Indonesia Pekanbaru dalam membina Usaha Kecil Mitra Binaan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kerja sama PT. Pos Indonesia Pekanbaru dengan Pengusaha Kecil Mitra Binaan.
2. Untuk mengetahui hasil dari kerjasama antara PT. Pos Indonesia pekanbaru dengan pengusaha kecil mitra binaan.
3. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap kemitraan PT. Pos Indonesia Pekanbaru dalam membina Usaha Kecil Mitra Binaan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan sumbangan yang bermanfaat sebagai bahan masukan bagi BUMN yang terkait khususnya PT. Pos Indonesia Pekanbaru.

2. Sebagai bahan masukan bagi para pengusaha kecil atau pemilik industri dalam upaya peningkatan industri, efisiensi dan peningkatan pendapatan serta kondisi kehidupan dan taraf hidup pengusaha dan para pekerjanya.
3. Sebagai bahan referensi dan acuan bagi penulis yang lain yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis melakukan studi lapangan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru yaitu di PT. Pos Indonesia Pekanbaru. Adapun alasan penulis melakukan penelitian ini karena penulis ingin mengetahui bagaimana kerjasama yang dilakukan PT. Pos Indonesia Pekanbaru dengan usaha kecil mitra binaan dan bagaimana hasilnya.

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah PT. Pos Indonesia Pekanbaru yaitu Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Daerah (PKBLD) berjumlah 2 orang. Karena jumlahnya sedikit maka penulis mengambil jumlah keseluruhan sebagai sampel. Dan jumlah Pengusaha Kecil Mitra Binaan PT. Pos Indonesia Pekanbaru pada tahun 2008 yaitu 76 orang pengusaha kecil. Karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya maka penulis mengambil sampel sebanyak 50 % dari jumlah populasinya yaitu 38 orang dengan menggunakan teknik random sampling.¹⁵

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : CV. Alfabeta, 1999), hal. 74

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Daerah PT. Pos Indonesia Pekanbaru dan Pengusaha Kecil.
- b. Objek dalam penelitian ini adalah kerjasama PT. Pos Indonesia Pekanbaru dengan mitra binaannya.

4. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dilokasi penelitian melalui daftar pertanyaan
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari tulisan-tulisan atau laporan-laporan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan kegunaan dan maksud dari penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa :

- a. Wawancara yaitu penulis mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden mengenai permasalahan yang diteliti
- b. Kuesioner yaitu pengumpulan data dengan membuat pertanyaan-pertanyaan kepada responden yang berkaitan dengan penelitian ini
- c. Study Dokumentasi yaitu untuk mendapatkan data-data yang terdokumentasi yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

6. Analisa Data

Dalam menganalisa data yang diperoleh dari objek penelitian ini penulis menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif yaitu data dikumpulkan dan ditabulasi kemudian di analisa berdasarkan teori yang ada disusun berdasarkan sub pembahasan.

7. Metode Penulisan

Setelah data penulis peroleh maka penulis akan membahas dengan metode-metode sebagai berikut :

- a. Deduktif yaitu gambaran keadaan umum yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu menggambarkan keadaan khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum
- c. Deskriptif yaitu mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun, menjelaskan dan kemudian menganalisisnya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan yang sistematika, maka pembahasan ini akan disusun dengan sistem penulisan sebagai berikut :

Bab I : Terdiri dari pendahuluan yang menerangkan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode pengumpulan data, subjek dan objek, populasi dan sampel, analisa data dan metode penulisan.

- Bab II : Tinjauan umum lokasi penelitian yang akan menerangkan tentang sejarah lahirnya PT. Pos Indonesia Pekanbaru, visi dan misinya, kondisi objektif dan struktur organisasi serta kewenangan dan tugas pokok PT. Pos Indonesia Pekanbaru.
- Bab III : Tinjauan umum tentang pengertian kerjasama, usaha kecil dan jenis-jenis usaha kecil, dan kemitraan.
- Bab IV : Tinjauan umum tentang bentuk-bentuk kerja sama PT. Pos Indonesia Pekanbaru dengan mitra binaan, implikasi kerjasama PT. Pos Indonesia Pekanbaru dengan pengusaha kecil mitra binaannya, dan tinjauan ekonomi Islam tentang kemitraan PT. Pos Indonesia Pekanbaru dalam mengembangkan usaha kecil mitra binaan.
- Bab V : Kesimpulan dan saran, bab ini merupakan bab penutup.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil PT. Pos Indonesia Pekanbaru

1. Sejarah berdirinya PT. Pos Indonesia Pekanbaru

PT. Pos Indonesia Pekanbaru adalah suatu badan yang bergerak pada bidang pelayanan masyarakat dalam hal pemberian jasa berupa pengiriman barang dan lain sebagainya. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT. Pos dan Giro. Dan pada beberapa tahun terakhir tepatnya ditahun 2000 ditukar menjadi PT. Pos Indonesia Pekanbaru. PT. Pos Indonesia Pekanbaru pada awal pendiriannya dengan statsbled No. 52 tahu 1884 dengan nama PT. Pos. Penyelenggaraan Telekomunikasi di hindia belanda pada waktu itu diselenggarakan oleh pihak swasta. Bahkan sampai tahun 1895 tercatat 38 perusahaan telekomunikasi yang kesemuanya dikelola oleh swasta. Pada tahun 1907 diambil oleh hindia belanda ini, maka peraturan berganti terhadap pengolahan pos dan giro. Sejarah berdirinya perusahaan ini dimulai pada masa penjajahan Belanda, diawali pada zaman VOC (1602-1795) Pos Indonesia didirikan di Batavia (Jakarta) pada tanggal 26 Agustus oleh Gubernur Jendral G W Baron Van Inhoff. Peran PT. Pos Indonesia (Persero) semakin penting dan berkembang setelah penemuan teknologi telegraf dan telepon (Jawatan PTT) berdasarkan Statblad No. 395 tahun 1906.¹

Sejak tahun 1907 jawatan PTT dikelola oleh Departemen Perusahaan atau Departemen Van Government Bedrijvent. Pada tahun 1922-1923 kantor pusat

¹ PT. Pos Indonesia Pekanbaru, *Profil PT. Pos Indonesia Pekanbaru* , Tahun 1999 hal.

PTT yang semula berkedudukan di Weltevren (Gambir) mulai dipindahkan ke gedung BOW (Burgerlijke Opentare Waken) di Bandung.

Pada tahun 1977, PT. Pos dan Giro ini melakukan ekspansi dan perluasan dalam hal pelayanan yang menyediakan berbagai sarana dalam hal pengiriman barang baik berupa surat maupun benda. Dengan usaha ini, maka sampai saat ini perusahaan tetap berkembang dan merupakan salah satu BUMN yang memiliki andil yang sangat erat dalam memajukan bangsa Indonesia dalam hal komunikasi melalui surat. Meskipun telah banyak berdiri perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman, tetapi PT. Pos Indonesia tetap memegang kepercayaan bangsa Indonesia untuk menggunakan perusahaan ini.

Tujuan perusahaan dijelaskan pada pasal 5 ayat 3 sebagai berikut: “Tujuan perusahaan adalah membangun, mengembangkan, dan mengusahakan mengembangkan pelayanan Pos dan Giro dalam arti yang seluas-luasnya guna mempertinggi kelancaran hubungan masyarakat untuk menjunjung tinggi terlaksananya pembangunan nasional”.²

Adapun tugas pokok PT. Pos Indonesia (Persero) Pekanbaru antara lain adalah:

1. Menyelenggarakan pelayanan Pos dan Giro yang merata di seluruh tanah air guna menjunjung tinggi pembangunan dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional dan mencapai masyarakat yang adil dan makmur
2. Dalam rangka pelaksanaan tugas pada Sub I tersebut merencanakan pembangunan dan memperluas sarana untuk pos dan giro agar menjunjung

² *Ibid.*, hal. 15

tinggi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraannya wawasan nusantara dan pergaulan dunia internasional.

2. VISI dan MISI PT Pos (persero) Indonesia Pekanbaru

1. Menjadi penyedia komunikasi kelas dunia dalam bentuk layanan yang sangat profesional serta peduli pada lingkungan sehingga mampu berkembang sesuai dengan konsep bisnis yang sehat.
2. Pos Indonesia senantiasa berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan produktifitas sumber daya serta kemampuan laba usaha melalui pemanfaatan IPTEK.

Adapun misi dari PT. Pos Indonesia Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan sarana komunikasi yang handal dan terpercaya bagi masyarakat serta pemerintah, guna menjunjung perkembangan nasional serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
2. Mengembangkan usaha yang bertumpu pada peningkatan pelayanan melalui penerapan IPTEK tepat guna untuk mencapai kepuasan pelanggan serta memberikan nilai tambah yang optimal bagi karyawan dan pemegang saham, masyarakat dan mitra kerja.³

B. Struktur Organisasi PT. Pos Indonesia (Persero) Pekanbaru

Sebagaimana layaknya sebuah organisasi atau perusahaan, untuk menjalankan kegiatan harus digariskan dalam suatu tugas dan wewenang. Untuk menggambarkan tugas dan wewenang serta untuk mengefektifkan kegiatan

³ *Ibid.*, hal. 15

operasional diperlukan struktur organisasi. Struktur organisasi dapat dibuat sesuai dengan manajemen perusahaan.

Dalam pembangunan dan pengelolaan suatu perusahaan diperlukan struktur organisasi yang baik dan personil yang memadai. Kedua aspek manajemen ini akan sangat menentukan keberhasilan perkembangan suatu perusahaan. Untuk memperoleh kelengkapan personil yang memadai, baik dalam jumlah maupun kualifikasi diperlukan adanya rencana pengadaan tenaga kerja yang berkualitas.

Dari struktur organisasi akan diketahui tentang tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing pekerja. Dari struktur organisasi juga akan diketahui kepada siapa harus dipertanggungjawabkan, intruksi-intruksi mana yang akan diikuti dan dilaksanakan, kepada siapa hasil pekerjaan itu dilaporkan dan sebagainya.

Untuk mengadakan pengelompokan dan pembagian tugas tersebut, maka PT. Pos Indonesia Pekanbaru menganut sistem organisasi garis dan staf yaitu bentuk organisasi yang umum dipakai oleh beberapa badan usaha dan juga hal-hal ini disebabkan karena PT. Pos Indonesia Pekanbaru ruang lingkup usahanya cukup luas. Dari struktur organisasi ini, maka perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasional.

Adapun tugas , fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dan dinas adalah :⁴

1. Kepala Kantor Daerah Pos dan Giro

- a. Kepala dan Deputi Waka secara kesatuan bertanggung jawab atas pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengintegrasian seluruh kegiatan unit-unit kerja dibawahnya sehingga diperoleh kinerja yang maksimal dalam mencapai misi, tujuan dan rencana kerja Pos Indonesia.
- b. Mengawasi secara keseluruhan aktivitas perusahaan
- c. Melakukan pendelegasian tugas sesuai dengan bagian-bagian yang dibutuhkan perusahaan
- d. Mengambil keputusan dengan segera dalam kondisi perusahaan yang memungkinkan
- e. Mengawasi secara keseluruhan aktivitas perusahaan sehubungan masalah administrasi dan umum serta masalah kepegawaian
- f. Melakukan pendelegasian tugas sesuai dengan administrasi dan umum
- g. Mengambil keputusan tentang hal yang berhubungan dengan administrasi dan kepegawaian
- h. Deputi kepala berperan dan bertanggungjawab sebagai pimpinan penyelenggara operasi.

⁴ Tamsir Bakrie, (*Kepala Unit Bagian PKBLD PT. Pos Indonesia Pekanbaru*),

2. Bagian Perencanaan

- a. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan untuk seluruh aktivitas perusahaan termasuk penelitian dan pengembangan dan pengusahaan kegiatan Pos Indonesia.
- b. Mengkoordinir, mengawasi dan melaksanakan kegiatan penyusunan rencana seluruh kegiatan dalam Pos Indonesia
- c. Secara teknis, perencanaan dibantu oleh penyusun program, bagian perpetaan dan pengukuran serta bagian penelitian dan pengembangan .

3. Bagian Sistem Informasi dan Sekretariat (Sisfo dan Sek)

- a. Urusan Sisfo
 - Memelihara dan mengoperasikan perangkat computer dan hardware
 - Membuat daftar gaji pegawai
 - Pengolahan kuitansi pelanggan
- b. Urusan Sekretariat
 - Membantu pimpinan dalam kesekretariatan dan keprotokolan (yang bersifat umum seperti wartawan, surat menyurat, informasi ke pihak luar, tamu dan lain sebagainya
 - Seksi hukum perserikatan bertugas menangani masalah keterlibatan perusahaan dengan hukum (pidana/perdata) dan pengkajian terhadap peraturan-peraturan tersebut.⁵

⁵ *Ibid.*,

4. Bagian Sumber Daya Manusia (SDM)

Bagian SDM tugasnya adalah mengurus kepegawaian seperti masalah kesehatan, bimbingan dan pelaksanaan pengamanan, pendidikan dan pelatihan serta kesekretariatan kandel dan juga public relation. Fungsinya mengurus administrasi kepegawaian, pemeliharaan kesehatan pegawai, bimbingan dan pelaksanaan pengamanan, pelaksanaan dan latihan serta penyelenggaraan kesekretariatan. Kandel dan public relation. Untuk lebih jelasnya tugas bagian SDM adalah sebagai berikut :

- a. pengurusan organisasi atau tata kerja, pengadaan dan mutasi pegawai
- b. pengurusan kenaikan gaji, pangkat, pengangkatan pegawai baru, pembinaan dan pemberian penghargaan kepada pegawai
- c. pengurusan pembuatan daftar penghasilan pegawai dan daftar pembayaran pensiun
- d. pemeliharaan data dan penyusunan statistik pegawai
- e. pengurusan kesejahteraan pegawai.
- f. Mengkoordinir dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pembinaan dan administrasi kesehatan serta pengolahan kebersihan lingkungan dan keselamatan kerja pegawai.⁶

5. Bagian Keuangan

Bagian keuangan ini dibagi atas tiga urusan yaitu ;

⁶ *Ibid.*,

- a. Urusan anggaran. Tugasnya adalah merencanakan, menyusun anggaran pendapatan serta mengevaluasi dan melaporkan realisasinya dan fungsinya adalah merencanakan, menyusun dan mengawasi anggaran pendapatan, biaya dan pembangunan.
- b. Urusan Pembendaharaan. Tugasnya adalah menerima dan menyimpan dan mengeluarkan serta surat-surat berharga dengan fungsi pelaksanaan tata usaha pembendaharaan, pengendalian dana kas dan bank.
- c. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan seluruh kegiatan financial, logistic, personalia dan umum dan mengkoordinir, mengawasi serta melaksanakan kegiatan penyusunan rencana keuangan dalam perusahaan.
- d. Secara teknis Manager Keuangan dibantu oleh bagian personalia dan umum serta bagian pengadaan dan keuangan. Bertanggung jawab kepada direktur keuangan dan umum.

6. Bagian Logistik

- a. Urusan Perencanaan Logistik. Tugasnya adalah menyusun program perencanaan pengadaan barang atau jasa, mempersiapkan, menghitung dan mengusulkan harga patokan serta mengelola sistem informasi perlengkapan. Fungsinya adalah menyusun harga patokan dan program perlengkapan operasional dan pembangunan.
- b. Urusan Administrasi. Tugasnya adalah mengurus pergudangan, tanah dan bangunan, barang inventaris, mencatat aktiva tetap,

mengurus penghapusan dan melaksanakan kesekretariatan bagian ini. Fungsinya menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang, mengelola administrasi kendaraan bermotor, pemeliharaan tanah, bangunan, perbaikan inventaris kantor dan kesekretariatan untuk bagian ini.

7. Dinas Penyotiran Surat dan Barang

Dinas ini mempunyai tugas mengoperasikan, memelihara dan memperbaiki alat-alat sebagai berikut :

- a. Melakukan sortir terhadap surat dan barang yang akan dikirimkan sesuai dengan kota dan tempat yang akan dituju
- b. Melakukan penyotiran terhadap surat dan barang yang telah diterima untuk selanjutnya diantar kealamat yang dituju.

8. Dinas Operasi Harian Pengantaran Surat

- a. Melakukan pengantaran surat dan barang sesuai dengan alamat yang dituju dalam surat dan barang tersebut.
- b. Membuat laporan atas pengiriman surat dan barang yang telah dilakukan oleh petugas
- c. Memisahkan surat yang tertera alamat salah untuk selanjutnya dikirim kembali ke alamat yang berikutnya.

9. Dinas Niaga

Dinas ini terdiri dari dua kelompok pelayanan khusus dan kelompok masyarakat. Masing-masing tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Memasarkan dan mempromosikan produk berupa jasa perangko maupun jasa pengantaran barang dan surat lainnya
- b. Melakukan distribusi jasa pos dan giro
- c. Melayani segala bentuk administrasi

C. Aktivitas Perusahaan

Jasa telekomunikasi yang disediakan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru dibagi dalam dua kelompok yaitu :

- 1. Jasa pengantaran surat dan barang atau sejenisnya
- 2. Jasa pengiriman surat dan barang atau sejenisnya.

Pengelompokan ini pun belum dilaksanakan secara tegas, mengingat teknologi yang canggih dan informasi berkembang dengan pesat. Bisnis utama PT. Pos Indonesia Pekanbaru sampai saat ini adalah menyediakan sarana berupa PTSN (*Public Swith Telephone Network*) dan menyelenggarakan jasa melalui PTSN.⁷

Jenis jasa telekomunikasi yang beroperasi sampai tahun 1995 ini adalah :

- 1. Jasa pengiriman dalam negeri
- 2. Jasa Lokal
- 3. Jasa bergerak seluler
- 4. Jasa satelit
- 5. Jasa-jasa lainnya

⁷ PT. Pos Indonesia Pekanbaru, *Loc. Cit.*, hal. 19

Jasa telekomunikasi dalam negeri merupakan kegiatan usaha PT. Pos Indonesia Pekanbaru yang memberikan pendapatan terbesar. Komposisi pendapatan jasa ini meliputi :

- a. Biaya pasang
- b. Biaya Abodemen (langganan) bulanan
- c. Biaya pemakaian telepon untuk panggilan jarak jauh dan local.

Jasa telekomunikasi lainnya adalah VSA, E-mail, calling cards, telex dan telegram. Jasa telex dan telegram dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan bergeser dengan faximili. Menghadapi kondisi ini, PT. Pos Indonesia Pekanbaru menandatangani memorandum of understanding dengan PT. Pos Indonesia pada tanggal 9 agustus 1995 mengenai pengalihan pengoperasian dan pengelolaan usaha telegraf.

BAB III

TINJAUAN TEORI TENTANG KERJASAMA, USAHA KECIL DAN KEMITRAAN

A. Pengertian Kerjasama

Pengertian kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada dikerjakan secara individual.¹

Kerjasama dalam istilah Islam adalah *Syirkah* yang artinya menurut bahasa adalah campur atau percampuran.² Demikian dinyatakan oleh *taqiyyuddin*, maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya adalah campur atau percampuran. Adapun menurut istilah syirkah adalah perserikatan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk meraih keuntungan.³ Atau persetujuan antara dua orang atau lebih untuk membuka perusahaan dengan tujuan membagi keuntungan, kerjasama ini bisa dalam bentuk modal dan jasa, presentase kepemilikan saham, pengelola dan bidang apa saja yang akan digarap bersama.⁴

¹ Tugimen, *Kewarganegaraan*, (Surakarta: CV. Grahadi, 2004), hal. 7

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 125

³ [Http: /// Fathul Barie V:129, co. id](http://FathulBarieV:129.co.id), diakses tanggal 8 April 2010

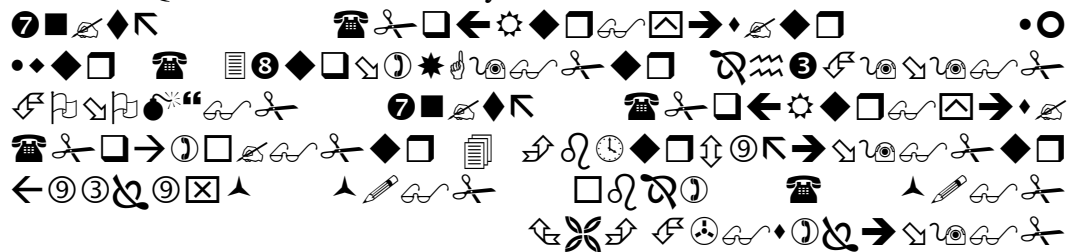
⁴ *Ibid.*,

Menurut istilah yang dimaksud dengan *Syirkah* para fuqaha berbeda pendapat, sebagai berikut:⁵

1. Menurut *Sayyid Sabiq* yang dimaksud dengan *Syirkah* adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan
2. Menurut *Muhammad al-Syarbini al-Khatib*, *syirkah* adalah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui)
3. Menurut *Imam Taqiyyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini*, *Syirkah* adalah ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui
4. Sedangkan menurut *Idris Ahmad* menyebutkan *Syirkah* sama dengan syarikat dagang yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerjasama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.

B. Dasar Hukum Kerjasama

Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat:2



Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan

⁵ *Ibid.*, hal. 126

*bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Surat Al-maidah:2).*⁶

Al-Qur'an Surat Shad ayat :24



*Artinya: “Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan amat sedikitlah mereka ini. (QS. Shaad:24)*⁷

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah :

“ Aku jadi yang ketiga antara orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat pada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lainnya, maka keluarlah aku darinya”.(HR. Abu Daud)⁸

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Toha Putra, , 2002), hal. 141

⁷ *Ibid.*, hal. 650

C. Bentuk-Bentuk Syirkah (Kerja Sama)

Menurut *Sayyid Sabiq*, Syirkah atau kerjasama ada empat macam antara lain yaitu :⁹

1. Syirkah Inan

Syirkah Inan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung atau rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing.

2. Syirkah Mufawadhah

Syirkah Muafawadhah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Modalnya harus sama-sama banyak. Bila ada anggota perserikatan modalnya lebih besar, maka syirkah itu tidak sah
- b. Mempunyai wewenang untuk bertindak, yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, anak-anak yang belum dewasa belum bisa menjadi anggota perserikatan
- c. Satu agama sesama muslim, tidak sah berserikat dengan sesama non muslim
- d. Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama syirkah (kerjasama).

⁸ Dikutip dari Imam Asy-syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal. 162

⁹ M. Ali. Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal.69

3. *Syirkah Wujud*

Syirkah wujud adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka.

4. *Syirkah Abdan*

Syirkah Abdan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Hasilnya dibagi antara sesama mereka berdasarkan perjanjian seperti pemborong bangunan, instalasi listrik dan lain-lain.¹⁰

5. *Syirkah Mudharabah*

Syirkah mudharabah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan ketentuan satu pihak memberikan kontribusi kerja (*'amal*) sedangkan pihak yang lainnya memberikan kontribusi modal (*mal*).¹¹

B. Usaha Kecil

Dewasa ini secara umum diakui bahwa usaha kecil dan menengah mampu memainkan peranan yang penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi karena usaha kecil merupakan penyumbang besar kepada kekuatan ekonomi negara dan telah terbukti terutama disaat resesi ekonomi tahun 1985 dan 1997.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 70

¹¹ M. Sholihuddin, *Asas- asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 146

Sesuai dengan arahan GBHN, pembangunan industri pada umumnya untuk meningkatkan nilai tambah, menyediakan barang dan jasa bermutu dengan harga bersaing dipasaran dalam negeri dan luar negeri, meningkatkan ekspor serta mengembangkan penguasaan teknologi.

Menurut Subanar, usaha kecil memiliki arti strategis secara khusus bagi perekonomian diantaranya :

1. Dalam banyak pekerjaan produk tertentu, perusahaan besar banyak menggantungkan kepada perusahaan-perusahaan kecil. Karena jika dikerjakan sendiri oleh mereka (perusahaan besar) maka marginnya tidak ekonomi
2. Merupakan pemerataan kosentrasi dan kekuatan-kekuatan ekonomi dalam masyarakat.¹²

Usaha kecil adalah kegiatan usaha yang mempunyai modal awal yang kecil atau nilai kekayaan (asset) yang kecil dan jumlah pekerjaan yang juga kecil.¹³ Sesuai dengan ketentuan pasal 5 Undang- Undang no. 9 tahun 1995 yang dimaksud dengan usaha kecil adalah kegiatan usaha yang mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
2. Milik Warga Negeri Indonesia

¹² Subanar, *Manajemen Usaha Kecil*, (Yogyakarta, BPFE, 1997), hal. 18

¹³ Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta, Kencana, 2004), hal. 365

3. Berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar
4. Berbentuk usaha perorangan.

Jenis usaha yang mempunyai kriteria seperti diatas oleh Bank Indonesia dikelompokkan sebagai kegiatan usaha yang perlu dibantu dengan Kredit Usaha Kecil (KUK). Kredit Usaha Kecil adalah kredit atau pembiayaan dari bank untuk investasi dan modal kerja yang diberikan dalam rupiah atau valuta asing kepada nasabah usaha kecil dengan kredit keseluruhan maksimal Rp. 500.000.000,- untuk membiayai usaha yang produktif yaitu usaha yang dapat memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan jasa.

Defenisi usaha kecil menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 1 miliar dan memiliki kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha paling banyak Rp. 200.000.000,-.¹⁴ Menurut kategori Badan Pusat Statistik (BPS), usaha kecil identik dengan industri rumah tangga. BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjanya yaitu :¹⁵

- a. Industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang
- b. Industri kecil dengan pekerja 5-19 orang

¹⁴ Suryana, *Kewirausahaan (pedoman praktis : kiat dan proses menuju sukses)*, (Bandung: Salemba Empat, 2003), hal. 119

¹⁵ Mudrjad, Kuncoro, *Ekonomika Industri Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2007), hal.

- c. Industri menengah dengan pekerja 20-99 orang
- d. Industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih.

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menegkop dan UKM) mendefinisikan usaha kecil termasuk usaha mikro sebagai suatu badan usaha milik warga negara Indonesia baik perorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan sebanyak-banyaknya Rp. 200 juta dan mempunyai hasil penjualan rata-rata per tahun sebanyak Rp.1 miliar dan usaha tersebut berdiri sendiri. Usaha menengah adalah badan usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan definisi usaha besar adalah badan usaha dengan nilai omset diatas dari itu.¹⁶

Sedangkan pengertian pengusaha dijelaskan oleh Maryoto Rahmat adalah seorang atau kumpulan orang yang mampu mengidentifikasi kesempatan-kesempatan (*business opportunities*) dan merealisasikannya dalam bentuk sasaran-sasaran yang harus dicapai.¹⁷

Secara spesifik adapun masalah dasar yang dihadapi oleh pengusaha kecil adalah sebagai berikut :

1. Kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar peluang pasar

¹⁶ Tulus Tambuan, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hal. 307

¹⁷ Maryoto, Rahmat, *Serikat Pekerja Pengusaha dan Kesepakatan Kerja Bersama*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1991), hal. 51

2. Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan
3. Kelemahan dibidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia
4. Keterbatasan jaringan usaha antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran)
5. Iklim usaha yang kurang kondusif, persaingan yang saling mematikan
6. Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.

Agar tidak terjadi masalah dalam usaha kecil maka ada beberapa strategi untuk pemberdaya yang tepat yang dapat diklasifikasikan dalam :¹⁸

- a. Aspek manajerial yang meliputi peningkatan produktifitas atau tingkat utilitas meningkatkan kemampuan pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia
- b. Aspek permodalan yang meliputi bantuan modal (penyisihan 1-5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimum 20% dari portofolio kredit bank) dan kemudahan kredit
- c. Mengembangkan program kemitraan dengan besar usaha baik lewat sistem Bapak Anak Angkat
- d. Pengembangan usaha industri kecil dalam suatu kawasan apakah berbentuk LIK (Lingkungan Industri Kecil), SUIK (Sarana Usaha

¹⁸ Mudrajad Kuncoro, *Op Cit.*, hal. 369

Industri Kecil) yang diduduki oleh UPT (Unit Pelayanan Teknis) dan TPI (Tenaga Penyuluh Industri)

- e. Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat Tenaga Penyuluh Industri dan Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan.

Berdasarkan pengertian dan batasan industri atau usaha kecil, perlu dikemukakan tujuan dari pengembangan industri. Berdasarkan ketetapan dalam GBHN tujuan pembangunan industri adalah:

1. Untuk menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memberikan kesempatan berusaha seluas-luasnya
2. Untuk dapat mengisi dan mewujudkan pendalaman struktur industri nasional baik secara vertikal maupun horizontal
3. Untuk mampu memperkuat struktur ekonomi, baik dengan mendorong optimasi pemanfaatan sumber daya alam, energi dan terutama manusia melalui perluasan usaha yang telah ada ditambah penciptaan usaha baru
4. Untuk dapat menaikkan sumbangan pada pendapatan nasional melalui Penyempurnaan sistem usaha peningkatan tenaga kerja
5. Mampu melestarikan dengan mengembangkan segi-segi kebudayaan nasional sebagai kekayaan bangsa yang bernilai tinggi.

Menurut Lampelius dan Thoma, kemungkinan permasalahan yang dihadapi oleh industri kecil adalah untuk membiayai sendiri usahanya terbatas mengingat perusahaan-perusahaan itu sebagai produksi yang tidak ekonomis atau ketergantungan dari pedagang-pedagang besar di segi finansial tidak mendapatkan

keuntungan. Disamping itu laba yang diperoleh tidak disalurkan kembali untuk kepentingan perusahaan melainkan kepentingan sendiri.¹⁹

Dengan melihat berbagai masalah pokok yang dihadapi oleh industri kecil perlu adanya perhatian khusus kepada pembinaan industri menuju tujuan yang diharapkan.

B. Jenis-Jenis Usaha

Kementrian Koperasi dan UKM mengelompokkan UKM menjadi tiga kelompok berdasarkan total aset, total penjualan tahunan dan status usaha dengan kriteria sebagai berikut :²⁰

1. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan bisnis paling banyak 100 juta rupiah.
2. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria berikut :
 - a. Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b. Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah

¹⁹ Christian Lampelius, Gert Thoma, *Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat Pendekatan Kebutuhan Pokok*, (Jakarta: LP3ES, 1979), hal. 50

²⁰ Zulkarnain, *Kewirausahaan "Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Penduduk Miskin"*, (Yogyakarta: Adicita, 2006), hal. 125-126

- c. Usaha yang berdiri sendiri bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah dan skala besar
 - d. Berbentuk badan usaha yang dimiliki perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi
3. Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria berikut:
- a. Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 200 juta rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan usaha
 - b. Usaha yang berdiri sendiri bukan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai dan terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar
 - c. Berbentuk usaha yang dimiliki perorangan, badan hukum yang tidak berbadan hukum termasuk koperasi.

Ketidakpahaman tentang kriteria tersebut diatas sering menyebabkan pengertian UKM menjadi berbeda sehingga sulit untuk mengambil suatu kesimpulan dan keputusan yang diperlukan. Bagaimanapun, usaha skala mikro, kecil dan menengah memiliki perbedaan yang melekat tentang ketiganya. Oleh karena itu, pemberdayaan terhadap mereka juga memerlukan perlakuan yang sedikit berbeda walaupun terdapat beberapa kesamaan.

Dalam rangka pembinaan koperasi dan pengusaha golongan lemah, yang bertujuan sebagai langkah awal guna mendorong kegairahan dan kegiatan ekonomi serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, memperluas lapangan kerja serta meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No:1232/KMK.013/1989 telah mengeluarkan “Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui Badan Usaha Milik Negara”.

Namun disadari pengembangan usaha kecil menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Lemahnya kemampuan manajerial dan sumber daya manusia mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik. Berdasarkan pengamatan Pusat Konsultasi pengusaha kecil UGM, urutan prioritas permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha kecil adalah :²¹

- a) Masalah belum dipunyainya sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik karena belum dipisahkannya kepemilikan dan pengelolaan perusahaan
- b) Masalah bagaimana menyusun proposal dan membuat studi kelayakan untuk memperoleh pinjaman baik dari bank maupun modal ventura karena kebanyakan pengusaha kecil mengeluh

²¹ Mudrjad, Kuncoro, *Ekonomika Industri Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2007), hal.

prosedur mendapatkan kredit yang berbelit, agunan tidak memenuhi syarat dan tingkat bunga dinilai terlalu tinggi

- c) Masalah menyusun perencanaan bisnis karena persaingan dalam merebut pasar semakin ketat
- d) Masalah akses terhadap teknologi, terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan atau grup bisnis tertentu dan selera konsumen cepat berubah
- e) Masalah memperoleh bahan baku, terutama karena adanya persaingan yang ketat dalam mendapatkan bahan baku
- f) Masalah perbaikan kualitas barang dan efisiensi terutama bagi yang sudah menggarap pasar ekspor karena selera konsumen berubah cepat, pasar dikuasai perusahaan tertentu dan banyak barang pengganti
- g) Masalah tenaga kerja karena sulit mendapatkan tenaga kerja yang terampil.²²

Dengan adanya beberapa kelemahan tersebut, pemerintah terus berupaya untuk membantu mengembangkan industri kecil. Beberapa alasan perlunya pengembangan usaha kecil adalah sebagai berikut:²³

²² *Ibid.*, hal. 368

²³ Murti Sumarni, *Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal.11

- a. Usaha /Perusahaan kecil menyerap atau melibatkan sejumlah besar sumber daya manusia termasuk didalamnya para wirausahawan atau calon-calon wirausahawan
- b. Dalam jangka pendek dapat mengatasi pembagian pendapatan yang belum rata dan juga mengatasi masalah pengangguran
- c. Dapat mempertinggi kemampuan produktif sumber daya manusia karena mereka dapat belajar pada tempat mereka bekerja
- d. Dalam jangka panjang dapat meningkatkan kecepatan perusahaan struktur ekonomi disemua daerah.

Beberapa langkah untuk mengembangkan usaha kecil antara lain adalah:²⁴

- a. Penyebarluasan dan pengembangan minat usaha
- b. Pemberian bantuan kredit dari bank dengan syarat lunak bagi para pengusaha kecil
- c. Peningkatan keterampilan anngkatan kerja dengan perluasan kesempatan kerja
- d. Membentuk atau mengaktifkan kembali sentra-sentra industri kecil dipedesaan untuk memperluas kesempatan kerja dipedesaan
- e. Pemerintah melalui Departemen terkait dan pemerintah daerah setempat dapat menyediakan Incubator yaitu berupa fasilitas bagi para pengusaha yang masih pemula untuk memperoleh semacam konsultasi atau informasi tentang segala yang menyangkut kebutuhan untuk pengembangan usahanya

²⁴ *Ibid.*, hal. 12

- f. Pembatasan investasi pada industri pada modal dan memperbanyak perluasan kesempatan berusaha dengan cara mendorong terbentuknya sistem mitra usaha dan bapak angkat antara perusahaan besar dan perusahaan kecil.

Perusahaan BUMN yang menjadi perantara untuk mengembangkan bakat wirausaha kepada para masyarakat tidak mampu memenuhi keinginan yang sesuai dengan targetnya. Perusahaan yang seharusnya memenuhi syarat untuk melakukan pembinaan bagi para pengusaha yang layak dibina hanya diberikan bantuan berupa pinjaman saja tanpa diiringi dengan pembinaan-pembinaan tentang bagaimana cara mengembangkan usaha dengan baik dan benar.

C. Kemitraan

A. Pengertian Kemitraan

Kunci keberhasilan dalam memberikan peluang untuk meningkatkan peran usaha kecil adalah melalui program kemitraan dimana pemerintah Indonesia dalam hal ini presiden telah mencanangkan program kemitraan pada tanggal 14 Januari 1991. Program kemitraan melalui keterkaitan bapak angkat dan mitra usaha tersebut mengatur hubungan kerjasama keterkaitan antara usaha besar dan usaha menengah dengan usaha kecil.²⁵

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia no.9 tahun 1995 “Kemitraan adalah Kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar

²⁵ James dan Akrasane, *Aspek-aspek finansial usaha kecil dan menengah*, (Jakarta: LP3ES, 1993), hal. 20

dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.

Menurut Muhammad Jafar Hafsah, “Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan”.²⁶

Menurut para ahli Kemitraan adalah Hubungan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencari keuntungan dimana suatu pihak berada dalam kondisi yang lebih rendah dari yang lainnya namun membentuk suatu hubungan yang mendudukkan keduanya berdasarkan kata sepakat untuk mencapai suatu tujuan. Pola kemitraan usaha terampil dalam pendekatan bidang ekonomi dalam rangka pemerataan usaha dalam pembangunan guna kesejahteraan rakyat.²⁷

Tiga unsur utama dalam pengertian kemitraan yaitu :

- a. Unsur kerjasama antara usaha kecil disatu pihak dan usaha menengah atau usaha besar dilain pihak
- b. Unsur kewajiban pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha menengah dan pengusaha besar.
- c. Unsur saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan,²⁸

²⁶ Mohammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000), hal. 10

²⁷ Jeane Neltje Saly, *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing dalam Perspektif Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2001), hal. 35

²⁸ Subanar, *Op cit.*, hal. 14

Pembinaan adalah upaya yang dilakukan dalam mengelola suatu usaha agar dapat diperoleh hasil yang optimal sesuai dengan apa yang diharapkan.²⁹

Pemerintah sudah melakukan pembinaan terhadap usaha kecil, menengah dan koperasi. Pembinaan terhadap kelompok usaha ini sudah mengalami perubahan. Dahulu pembinaan terhadap koperasi dipisahkan dengan pembinaan terhadap usaha kecil dan menengah yang satu dibina oleh Departemen Koperasi sedangkan yang lain dibina oleh Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan setelah melalui perubahan beberapa kali maka semenjak beberapa tahun terakhir pembinaan terhadap usaha kecil, menengah dan koperasi dilakukan satu atap dibawah Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.

B. Jenis-jenis Kemitraan

Hubungan usaha antara industri besar atau menengah dengan industri kecil dapat dijalin melalui empat model kemitraan yaitu :³⁰

a. Kemitraan Hulu-hilir (Forward Linkage)

Model ini menempatkan industri kecil sebagai penyedia barang atau jasa untuk industri besar dan menengah yang terkait. Dengan demikian industri kecil tersebut mempunyai *captive market* yang dapat diandalkan tanpa harus mencari daerah pemasaran

²⁹ Rivai, Veithzal, *Kredit Manajemen Handbook*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2006), hal. 482

³⁰ Murti Sumarni, *Op cit.*, hal. 78

b. Kemitraan Hilir-hulu (*Backward linkage*)

Model kedua ini menempatkan industri kecil sebagai penyedia kebutuhan bahan mentah serta suku cadang bagi usaha besar dan menengah. Model ini mengantisipasi adanya monopoli dari perusahaan besar yang biasanya ingin menguasai seluruh aktivitas usaha mulai dari hulu sampai ke hilir yaitu mulai dari proses produksi sehingga pemasaran produknya.

c. Kerjasama Pemilikan Saham

Hal ini dilakukan dengan cara memberikan prioritas penjualan saham *go public* pada kalangan industri kecil.

d. Kerjasama Bapak-Anak Angkat

Model kerjasama ini dapat secara *forward* maupun *backward*, dengan titik berat yaitu keharusan untuk membina dan ikut serta menjamin kelangsungan hidup sesama mitra usaha. Jadi industri besar atau menengah dituntut untuk memiliki tanggung jawab sosial

BAB IV

IMPLIKASI KERJASAMA PT. POS INDONESIA PEKANBARU DENGAN PENGUSAHA KECIL MITRA BINAAN MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM

A. Bentuk kerjasama PT. Pos Indonesia Pekanbaru dengan Pengusaha Kecil Mitra Binaan

PT. Pos Indonesia (Persero) adalah salah satu BUMN yang perannya membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, selain menjalankan kegiatan bisnis PT. Pos Indonesia (Persero) juga berfungsi sosial dan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyalurkan berbagai macam bantuan.

Salah satu penyaluran bantuan yang di realisasikan oleh PT. Pos Indonesia adalah adanya kerjasama PT. Pos Indonesia dengan usaha kecil dalam bentuk pembinaan terhadap usaha kecil.

Kerjasama yang dilakukan PT. Pos Indonesia Pekanbaru dengan pengusaha kecil ini merupakan realisasi dari pemberdayaan program pemerintah yang mewajibkan bagi perusahaan besar untuk membantu mengembangkan usaha-usaha kecil guna menanggulangi kemiskinan .

PT. Pos Indonesia Pekanbaru telah melakukan kerjasama dengan pengusaha kecil dalam bentuk mitra binaan sejak tahun 1992. Sejak dicanangkannya program pemerintah yang mewajibkan bagi seluruh perusahaan besar terutama BUMN untuk membantu para pengusaha kecil yang membutuhkan bantuan dan binaan dalam mengelola usahanya agar dapat berkembang sesuai yang diharapkan.¹

¹ Tamsir Bakri, (*Kepala Unit PKBLD PT.Pos Indonesia Pekanbaru*), Wawancara, Tanggal

Tabel 1

Data Pengusaha Kecil Mitra Binaan PT. Pos Indonesia Pekanbaru dari Tahun 2004 – 2008.

No	Periode	Jumlah Mitra Binaan (Orang)
1	2004	72
2	2005	92
3	2006	84
4	2007	78
5	2008	76

Sumber Data : PT. Pos Indonesia Pekanbaru

Dari table 1 di atas, diketahui bahwa jumlah mitra binaan PT. Pos Indonesia Pekanbaru dari tahun ke tahun jumlahnya tidak tetap. Dari tahun 2004 ke tahun 2008 jumlahnya semakin menurun, kecuali tahun 2005 yang jumlahnya meningkat. Pada tahun 2004 jumlah mitra binaan PT. Pos Indonesia Pekanbaru sebanyak 72 orang, tahun 2005 meningkat menjadi 92 orang, kemudian pada tahun 2006 jumlahnya menurun menjadi 84 orang, tahun 2007 jumlahnya semakin menurun yaitu 78 orang dan pada tahun 2008 menjadi 76 orang. Hal ini disebabkan dana yang dimiliki oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru untuk menyalurkan bantuan modalnya sangat terbatas, tergantung dengan pendapatan yang diperoleh oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru untuk menyalurkan pinjaman sangat kecil karena hanya sebagian kecil saja keuntungan yang diperoleh digunakan untuk membantu mitra binaan.

Tabel 2

**Data Jenis Sektor Usaha Kecil Mitra Binaan PT. Pos Indonesia Pekanbaru
Tahun 2004-2008**

Jenis Usaha	2004	2005	2006	2007	2008
Perdagangan	40	60	56	48	46
Jasa	20	23	22	19	16
Industri	12	9	6	11	14
Jumlah	72	92	84	78	76

Sumber : PT. Pos Indonesia Pekanbaru

Dari table 2 diatas dapat diketahui jumlah pengusaha kecil mitra binaan PT. Pos Indonesia Pekanbaru menurut jenis-jenis sektor usaha yang dijalankan oleh pengusaha kecil. Jumlah Usaha Mitra Binaan PT. Pos Indonesia Pekanbaru dari tahun ke tahun berbeda-beda. Dari tahun 2004 sampai tahun 2008 sektor usaha yang terbesar adalah perdagangan, kemudian setelah perdagangan jumlah usaha yang banyak dijalankan adalah sektor jasa dan yang paling sedikit adalah industri. Ini disebabkan karena PT. Pos Indonesia Pekanbaru lebih banyak menyalurkan bantuan modal kepada pedagang.²

² *Ibid.*,

Tabel 3

Data Responden Pengusaha Kecil Mitra Binaan PT. Pos Indonesia Pekanbaru Tahun 2008

No	Jenis – jenis Usaha	Jumlah Mitra Binaan (Orang)
1	Dagang Sembako	18
2	Dagang Kain	5
3	Jasa Perbengkelan	6
4	Jasa Jahit Pakaian	2
5	Jasa Salon	2
6	Industri Perabotan	3
7	Industri Tahu	2
Jumlah		38

Sumber: PT. Pos Indonesia Pekanbaru

Dalam memberdayakan usaha kecil, pemerintah mencanangkan agar perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan BUMN membantu mengembangkan usaha kecil dalam bentuk kerjasama.

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru dengan pengusaha kecil mitra binaan adalah dengan menjalankan program kemitraan dengan pengusaha kecil. Pola kemitraan yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru adalah program Bapak- Anak Angkat Mitra Usaha Industri. Adapun yang menjadi bapak angkat adalah PT. Pos Indonesia Pekanbaru, sedangkan Anak Angkatnya adalah pengusaha kecil yang memerlukan binaan dalam menjalankan usahanya.³

Bentuk bantuan dari bapak angkat harus dengan inisiatif sendiri membina perusahaan industri kecil dalam berbagai bentuk terutama dalam hal permodalan, pemasaran jika usaha kecil yang menjadi anak angkatnya bergerak di bidang industri

³ Muslim, (Pegawai Kantor POS, Unit PKBLD PT.Pos Indonesia Pekanbaru), Wawancara, pada Tanggal 8 Agustus 2009

yang menghasilkan sebuah produk dan memerlukan pasar untuk mendistribusikan barang tersebut, memberikan pembinaan dan pelatihan pengusaha kecil, memberikan bimbingan usaha, temu usaha atau seminar-seminar usaha kecil.⁴

Usaha PT. Pos Indonesia Pekanbaru dalam membantu pengusaha kecil mengembangkan dan mengelola usaha mitra binaannya adalah dari segi:

1. Permodalan

Adapun tujuan hubungan keterkaitan PT. Pos Indonesia dengan mitra binaannya tidak lain adalah untuk meningkatkan usaha mitranya dalam hal permodalan, keterampilan, produksi, pemasaran dan pendapatan yang secara keseluruhan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup sejahtera masyarakat khususnya mitra binaan PT. Pos Indonesia Pekanbaru.

Untuk membantu meningkatkan dan mengembangkan usaha kecil dipekanbaru, PT. Pos Indonesia Pekanbaru berusaha memberikan bantuan berupa permodalan karena dilihat dari segi kendala-kendala usaha kecil banyak sekali usaha-usaha yang dijalankan oleh pengusaha kecil tersebut tidak bisa dikembangkan karena masalah permodalan.

Sebenarnya usaha-usaha yang dijalankan oleh para pengusaha secara kecil-kecilan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi para pengangguran sehingga kemiskinan sedikit demi sedikit dapat diatasi. Dan karena tidak memiliki modal sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menjalankan usahanya maka usaha yang dijalankan tersebut tidak bisa diteruskan dan akhirnya mengalami kebangkrutan sehingga terjadilah pengangguran.

Pemberian bantuan modal di PT. Pos Indonesia Pekanbaru ini diberikan bukan secara cuma-cuma tetap dalam bentuk pinjaman atau kredit yang harus dikembalikan

⁴ Tamsir Bakri, *Loc. cit.*,

pada tanggal jatuh temponya dengan imbalan bunga sebesar 6 % perbulan. Besarnya pinjaman yang diberikan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru dari Rp.5000.000,- ke atas hingga Rp.75.000.000,- kebawah sesuai dengan permintaan dan kelayakan usaha yang dijalankan untuk diberikan pinjaman.⁵

Dengan itu pendapatan yang diperoleh oleh pengusaha kecil akan bertambah dari jumlah pendapatan sebelum di berikannya tambahan modal bagi usahanya.

2. Pembinaan dan Pengarahan

Binaan yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru kepada pengusaha kecil mitra binaan adalah :

a. Melakukan Pengawasan

Untuk membantu mengembangkan usaha yang dikelola oleh para nasabah yang telah menerima bantuan dana dari PT. Pos Indonesia Pekanbaru, maka pihak PT. Pos Indonesia Pekanbaru tidak dengan begitu saja hanya memberikan pinjaman berupa modal tetapi setelah nasabah diberi pinjaman modal, PT. Pos Indonesia Pekanbaru juga melakukan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah. Pengawasan yang dilakukan PT. Pos Indonesia Pekanbaru adalah dalam bentuk kunjungan ketempat usaha nasabah yang telah diberikan pinjaman modal atau memantau perkembangan usaha dengan mengadakan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lainnya terkait dengan pelaksanaan usaha.⁶

Dalam melakukan kunjungan ke tempat usaha yang dijalankan oleh nasabah, PT. Pos Indonesia melakukan kunjungan setiap 3 bulan sekali ketempat usaha nasabah setelah diberi pinjaman. Dan yang menjadi pelaksana pengawasannya adalah

⁵ *Ibid.*,

⁶ Muslim, *Loc. cit.*,

pegawai PT. Pos Indonesia Pekanbaru bagian usaha kecil mitra binaan yang memberikan pinjaman kepada nasabah.

Tujuan dilaksanakan pengawasan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru adalah untuk mempertimbangkan dan memantau efektifitas dana yang dimanfaatkan peminjam dan untuk menghindari terjadinya resiko penyelewengan oleh para nasabah.

b. Memberikan pengarahan

Pengarahan yang diberikan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru kepada nasabah berupa motivasi dari PT. Pos Indonesia Pekanbaru untuk lebih meningkatkan usahanya. Motivasi yang dilakukan PT. Pos Indonesia Pekanbaru adalah dengan mengadakan pertemuan bagi nasabah-nasabah yang tergabung dalam mitra usaha PT. Pos Indonesia Pekanbaru dan memberikan arahan dan bimbingan tentang bagaimana nasabah harus meningkatkan usaha yang dijalankan dengan modal yang diberikan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru.

Arahan dan bimbingan ini diberikan melalui adanya seminar- seminar yang diadakan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru bekerjasama dengan sebuah Instansi pemerintahan seperti Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau Dinas Ketenagakerjaan guna memberikan pengarahan bagi para pengusaha kecil yang tergabung dalam mitra binaan PT. Pos Indonesia Pekanbaru tentang bagaimana mengembangkan usaha agar memperoleh keuntungan yang maksimum. Diadakannya seminar atau pertemuan antara pengusaha kecil mitra binaan PT. Pos Indonesia Pekanbaru ini hanyalah semata untuk menghindari ketidakefisienan penggunaan dana yang telah disalurkan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru.⁷

c. Melakukan Pembinaan

⁷ Tamsir Bakri, *Loc. cit.*,

PT. Pos Indonesia selain memberikan pengawasan dan pengarahan bagi pengusaha kecil juga melakukan pembinaan terhadap usaha yang dijalankan agar dapat berkembang menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya.

PT. Pos Indonesia Pekanbaru bersedia melakukan pembinaan terhadap mitra binaan khususnya pada usaha kecil dengan tujuan agar nantinya para pengusaha tersebut dapat berusaha secara mandiri dan dengan sendirinya akan membuka lapangan pekerjaan bagi para pengangguran.

Pembinaan yang diberikan kepada pengusaha kecil berupa pelatihan keterampilan dan manajemen berusaha, karena kebanyakan para pengusaha kecil tersebut menjalankan usahanya tanpa pengetahuan dan manajemen berusaha yang baik sehingga usaha yang dijalankan tidak dapat dikontrol bagaimana perkembangannya.

Pengawasan dan pembinaan mitra binaan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru ini dilakukan setiap 3 bulan setelah pengusaha kecil tergabung dalam mitra binaan PT. Pos Indonesia Pekanbaru. Hal ini dilakukan untuk memantau perkembangan usaha yang dijalankan oleh mitra binaan PT. Pos dengan dana pinjaman yang diberikan agar terkontrol dengan baik dan tidak terjadi resiko kredit macet.⁸

Dengan adanya bantuan dari pihak PT. Pos Indonesia Pekanbaru maka diyakini dapat membawa perubahan bagi usaha mitra binaannya karena modal yang dipinjamkan juga disertai dengan arahan dan bimbingan dari PT. Pos Indonesia Pekanbaru atau bagiab PKBLD tentang bagaimana menjalankan usaha yang baik dan benar agar mendapatkan keuntungan dan memperkembang usaha mereka.

⁸ *Ibid.*,

Apabila mitra binaan tidak melunasi kewajiban sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka pihak PT. Pos Indonesia Pekanbaru harus cepat tanggap mengatasi hal ini, karena untuk menghindari terjadinya resiko kredit macet. Hal yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru jika ada mitra binaan tidak melunasi kewajiban sesuai dengan yang ditentukan adalah sebagai berikut :

- a. Apabila pengusaha kecil mitra binaan tidak membayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pembayaran angsuran kredit dilakukan setiap bulan dikantor pos pekanbaru pada loket bagian angsuran kredit selambat-lambatnya pada tanggal 20. Apabila lewat dari tanggal 20 mitra binaan belum membayar angsurannya maka sudah dikategorikan ke dalam kredit bermasalah. PT. Pos Indonesia Pekanbaru akan memberikan teguran kepada mitra binaan sebagai langkah awal untuk menyelesaikan pembayaran.
- b. Apabila teguran yang pertama tidak dihiraukan oleh mitra binaan, maka di kirimkan surat panggilan teguran yang kedua agar mitra binaan datang ke PT. Pos Indonesia Pekanbaru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mitra binaan sehingga tidak bisa membayar angsuran pinjamannya.
- c. Apabila surat teguran yang dikirim oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru tidak dihiraukan oleh mitra binaan, maka hal yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru mendatangi usaha mitra binaan, apabila ada kendala atau masalah yang dihadapi oleh mitra binaannya sehingga tidak bisa membayar angsuran pinjaman maka PT. Pos akan memberikan keringanan jangka waktu sampai mitra binaan bisa membayar kembali angsuran pinjamannya.

- d. Apabila kemudahan yang diberikan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru tidak dihiraukan lagi oleh mitra binaan maka dalam beberapa waktu setelah diberikan keringanan tidak juga dilunasi maka PT. Pos Indonesia Pekanbaru akan mengambil tindakan dengan menjual agunan yang diberikan oleh mitra binaan untuk melunasi utang si mitra kepada PT. Pos Indonesia Pekanbaru.⁹

B. Implikasi Kerjasama PT. Pos Indonesia Pekanbaru dengan Pengusaha Kecil Mitra Binaan

Sejak tahun 1992, usaha kecil telah menjadi mitra binaan PT. Pos Indonesia Pekanbaru. Pengembangan usaha nasional yang meliputi usaha kecil menengah dan koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta usaha swasta diarahkan agar mampu tumbuh menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi daerah khususnya daerah Pekanbaru serta memperluas kesempatan usaha dan kesempatan kerja menuju perekonomian daerah yang tangguh dan mandiri.

Usaha kecil dan menengah memiliki kendala-kendala dalam mengembangkan usahanya. Salah satu kendala yang dihadapi oleh para pengusaha kecil adalah keterbatasan modal usaha. Untuk itu penulis akan menjelaskan sedikit tentang modal pengusaha kecil.

a. Modal

Modal merupakan salah satu dari beberapa fungsi produksi yang ada, dan modal merupakan salah satu sumber kekuatan yang paling utama dalam aktivitas

⁹ *Ibid.*,

dunia usaha khususnya usaha kecil.¹⁰ Oleh karena itu modal usaha mempunyai peranan penting yang akan menentukan keberhasilan usaha khususnya usaha kecil.

Modal awal yang digunakan oleh pengusaha kecil untuk memulai usahanya berasal dari modal sendiri. Hanya ebagian kecil saja yang memiliki modal gabungan dengan keluarga namun tidak ada keterkaitan atau kerjasama usaha yang dimiliki. Keberadaan modal awal ini tentunya sangat kecil sekali untuk memulai suatu usaha dan dalam mengembangkan usaha tersebut.

Modal usaha merupakan faktor utama dalam memulai suatu usaha untuk menentukan ruang gerak bagi kegiatan dan perkembangan atau kelangsungan hidup usaha. PT. Pos Indonesia Pekanbaru memberikan bantuan modal kepada usaha kecil mitra binaannya untuk mengembangkan usahanya, sehingga modal awal yang dimiliki semakin bertambah sehingga pengusaha kecil tersebut bisa mengembangkan dan memanfaatkan modal usaha tersebut dengan sebaik mungkin agar dapat meraih keuntungan yang maksimal dan menciptakan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari responden besarnya bantuan modal yang diberikan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru kepada pengusaha kecil berkisar antara Rp. 5.000.000,- – Rp. 75.000.000.

¹⁰ James, *Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 1997), hal. 20

Tabel 4

Besarnya Pinjaman Yang Disalurkan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru Kepada Pengusaha Kecil Mitra Binaan.

No	Besar Pinjaman Modal (Rp)	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	5.000.000 – 9.000.000	4	10,50
2	10.000.000 – 30.000.000	26	68,50
3	50.000.000 – 75.000.000	8	21,00
	Jumlah	38	100

Sumber data : PT. Pos Indonesia Pekanbaru

Tabel 4 : menunjukkan bahwa besarnya pinjaman yang diberikan oleh PT.Pos Indonesia kepada pengusaha kecil dari Rp. 5.000.000 – Rp. 50.000.000,-, responden yang menjawab Rp. 5.000.000 – Rp. 9.000.000 sebanyak 4 orang atau sebesar 10,5 %, yang menjawab Rp. 10.000.000 – Rp. 30.000.000,- adalah 26 Orang atau sekitar 68,5 % dan yang menjawab Rp. 50.000.000 – Rp. 75.000.000 adalah 8 orang atau 21 %. Dari jawaban responden di atas dapat diketahui bahwa besarnya pinjaman yang disalurkan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru rata-rata mendapatkan pinjaman berkisar antara Rp. 10.000.000 – Rp. 30.000.000,-. Hal ini karena ditinjau dari segi kemampuan pengusaha kecil dalam menjalankan usahanya layak atau tidak layak untuk memperoleh pinjaman modal dari PT. Pos Indonesia dan juga ditinjau berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru itu sendiri.

Adapun kriteria usaha kecil yang diberi bantuan modal usaha oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru adalah usaha kecil yang benar-benar membutuhkan modal usaha , usaha tersebut layak untuk dikembangkan, pengusahanya mau bekerja keras sesuai dengan kemampuan untuk mengembangkan usahanya serta usaha yang dilakukan

telah dijalankan beberapa tahun sebelum memperoleh bantuan atau menjadi mitra PT. Pos Indonesia Pekanbaru, usaha yang dikelola tidak berpindah-pindah tempat dalam artian yang disatu tempat saja pengusaha tersebut menjalankan usahanya sehingga pihak PT. Pos Indonesia Pekanbaru dapat dengan mudah menjangkau tempat usaha mereka jika sewaktu-waktu mengadakan kunjungan ke tempat usaha kecil mitra binaannya untuk melakukan peninjauan dan pengawasan.¹¹

b. Prosedur dan Waktu Peminjaman

Prosedur dan persyaratan pinjaman yang ditetapkan oleh pihak kreditur akan mempengaruhi keinginan nasabah untuk meminjam pada bank atau lembaga keuangan. Jika prosedur dan persyaratan yang ditetapkan mudah maka akan menarik minat calon nasabah untuk meminjam. Sebaliknya apabila prosedur dan persyaratannya berbelit-belit maka nasabah tidak berminat untuk melakukan peminjaman. Prosedur peminjaman yang ditetapkan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru dapat dilihat dari beberapa jawaban dari responden seperti dibawah ini.

Tabel 5

Prosedur dan Persyaratan Peminjaman yang Ditetapkan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru

No	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Mudah	15	39,50
2	Sedang	20	52,60
3	Sulit	3	7,90
	Jumlah	38	100

Sumber :Olahan Data

¹¹ Tamsir Bakri, *Loc. cit.*,

Dari Tabel 5, diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh PT. Pos Indonesia sangat beraneka ragam. Yang mengatakan bahwa prosedur peminjaman di PT. Pos Indonesia Pekanbaru sangat mudah ada 15 responden atau 39,50 %, yang mengatakan bahwa prosedurnya sedang atau sama seperti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan di tempat lain adalah 20 responden atau 52,60 %, dan yang menjawab sulit adalah 3 responden atau 7,90 %. Jadi dari keterangan diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru untuk menjadi mitra atau untuk memperoleh pinjaman adalah sedang atau sama seperti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan di tempat lain untuk memperoleh pinjaman.

Pembayaran kredit atau pinjaman yang disalurkan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru dilakukan secara angsuran atau cicilan setiap bulannya. Pembayaran angsuran dilakukan di PT. Pos Indonesia Pekanbaru di bagian pembayaran angsuran kredit sesuai dengan tanggal yang telah disepakati antara pengusaha kecil dengan PT. Pos Indonesia Pekanbaru. Jangka waktu yang ditetapkan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru dengan mitra binaannya dapat dilihat dari jawaban responden berikut ini:

Tabel 6

Jangka Waktu Pembayaran Angsuran di PT. Pos Indonesia Pekanbaru

No	Jangka Waktu (Tahun)	Jumlah Responden	Persentase(%)
1	1	2	5,26
2	1 – 3	36	94,74
3	3 – ke atas	-	
	Jumlah	38	100

Sumber: Hasil Olahan Data

Dari tabel 6, diketahui bahwa jangka waktu pembayaran angsuran kredit atau pinjaman adalah yang mengatakan dalam 1 tahun angsuran ada 2 responden atau 5,26 %, dan yang membayar angsuran dalam jangka waktu 1 – 3 tahun adalah 36 responden atau 94,74 %, dan yang menjawab dalam jangka waktu 3 tahun ke atas tidak ada. Ini disebabkan karena PT. Pos Indonesia Pekanbaru hanya menetapkan lamanya waktu kredit yang diberikan adalah sampai 36 kali angsuran atau 3 tahun ke bawah. Diatas 3 tahun atau lebih dari 36 kali angsuran tidak memberikan izin untuk menerima atau mengajukan permohonan ke PT. Pos Indonesia Pekanbaru. Alasan ini ditetapkan untuk menghindari terjadinya resiko akan terjadinya kredit macet akibat lamanya jangka waktu angsuran yang diberikan sehingga dana yang seharusnya dapat bergulir kepada pengusaha yang lain jadi terhambat karena adanya kendala-kendala dalam pembayaran angsuran.

c. Suku Bunga

Proses pemberian bantuan permodalan yang mudah membuat pelaku pengusaha kecil dan menengah mudah mendapatkan bantuan permodalan dengan tingkat suku bunga yang rendah serta proses pembayaran cicilan yang mudah dan ringan mempermudah pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usahanya.

Tingkat suku bunga merupakan suatu arena persaingan dalam dunia perbankan untuk menarik minat masyarakat dalam penyaluran berbagai jenis kredit. Suku bunga pinjaman yang rendah dapat mempengaruhi calon nasabah untuk menentukan pilihannya. Nasabah umumnya akan tertarik bila suku bunga pinjaman rendah dan suku bunga tabungan tinggi. Jadi hal ini merupakan suatu persaingan bagi perbankan atau lembaga keuangan lainnya dalam menentukan suku bunga.

Bunga dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli dan menjual

produknya. Bunga bagi bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman) serta harga yang dibebankan kepada biaya-biaya jasa bank lainnya.

Namun dalam penelitian ini, PT. Pos Indonesia Pekanbaru hanya menyalurkan kredit usaha kecil dalam bentuk mitra binaan saja tanpa menghimpun dana dari masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh pihak perbankan. Jadi hanya suku bunga pinjaman atau disebut jasa administrasi pinjaman dalam program kemitraan.¹² Berikut ini tanggapan pengusaha kecil mitra binaan PT. Pos Indonesia Pekanbaru tentang suku bunga yang ditetapkan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru.

Tabel 7

Suku Bunga yang Ditetapkan PT. Pos Indonesia Pekanbaru

No	Tingkat Suku Bunga	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Tinggi	4	10,50
2	Sedang	9	23,70
3	Rendah	25	65,80
	Jumlah	38	100

Sumber: Data Olahan

Dari tabel 7, di atas dapat diambil kesimpulan tentang tanggapan suku bunga yang ditetapkan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru, 4 responden atau 10,50 % menyatakan tinggi bunga yang ditetapkan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru, 9 responden atau 23,70 % sedang dan yang menyatakan rendah sebanyak 25 responden atau 65,80 %. Sebagian besar responden menyatakan suku bunga yang ditetapkan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru rendah artinya bantuan modal yang diberikan oleh

¹² Muslim, *Loc. cit.*,

PT. Pos Indonesia Pekanbaru benar-benar bersifat ingin membantu pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya dengan memberikan bantuan modal usaha dengan bunga yang ringan tanpa membebani pengusaha kecil.

d. Promosi

Promosi juga berarti adalah aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. Promosi merupakan salah satu aspek penting dalam pemasaran suatu produk atau jasa karena dengan adanya promosi mendorong pembelian bagi calon pembeli baik jasa ataupun produk. Untuk itu peranan promosi tidak dapat diabaikan begitu saja, tanpa adanya promosi yang jelas produk atau jasa yang akan dijual tidak begitu dikenal konsumen.

Kebijaksanaan promosi yang dilakukan PT. Pos Indonesia Pekanbaru secara tidak nampak. Pihak manajemen perkreditan atau unit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKPBL) PT. Pos Indonesia Pekanbaru menyatakan bahwa promosi yang mereka lakukan hanyalah melalui brosur atau pengumuman di mading (majalah dinding) yang ditempel di Kantor Pos dan sosialisasi dengan masyarakat sekitar dikarenakan dana yang disalurkan setiap tahunnya terbatas sesuai dengan jumlah pendapatan dan keuntungan PT. Pos Indonesia Pekanbaru sehingga yang dapat mengajukan permohonan pinjaman juga terbatas. Sehingga banyak konsumen atau masyarakat yang tidak tahu akan keberadaan pinjaman yang disalurkan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru. Berikut tanggap dari responden informasi tentang adanya pinjaman kredit di PT. Pos Indonesia Pekanbaru.

Tabel 8

Sumber Informasi tentang pinjaman kredit di PT. Pos Indonesia Pekanbaru

No	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Media Elektronik	-	-
2	Marketing PT. Pos Indonesia	8	21,05
3	Masyarakat	30	78,95
	Jumlah	38	100

Sumber: Hasil Data Olahan

Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar sebanyak 30 responden atau 78,95 % mendapatkan informasi tentang adanya pinjaman kredit di PT. Pos Indonesia Pekanbaru diperoleh dari masyarakat. Masyarakat disini merupakan teman dari responden atau dari mitra binaan yang dulu pernah mendapatkan bantuan dari PT. Pos Indonesia Pekanbaru. Sedangkan yang memperoleh informasi dari marketing PT. Pos Indonesia Pekanbaru sebanyak 8 responden atau 21,05 % sedangkan dari media elektronik tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa promosi yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru sangat kurang sehingga kebanyakan dari nasabahnya mendapatkan informasi dari masyarakat atau dari mitra binaan sebelumnya.

e. Tingkat pendapatan dan Kondisi usaha

Dengan adanya bantuan dari PT. Pos Indonesia berupa modal usaha dan binaan maka sangat membantu bagi para pengusaha kecil untuk mengembangkan dan meningkatkan usahanya khususnya bagi pengusaha kecil yang tergabung dalam mitra binaan PT. Pos Indonesia. Dengan menjadi mitra PT. Pos Indonesia Pekanbaru maka usaha yang dilakukan oleh pengusaha kecil akan semakin meningkat, baik dari segi pendapatan, perkembangan usaha dan produk yang dihasilkan apabila pengusaha kecil bergerak di bidang industri.

Seiring dengan bertambahnya modal usaha pengusaha kecil maka nilai produksinya juga harus ditingkatkan sesuai dengan hasil yang diinginkan sebelum pengusaha kecil mendapatkan bantuan atau menjadi mitra binaan PT. Pos Indonesia Pekanbaru. Semula yang nilai produksinya terputus-putus atau banyak mengalami kendala karena keterbatasan modal usaha harus ditingkatkan setelah mendapatkan bantuan dari PT. Pos Indonesia Pekanbaru dan mengembangkan usahanya dengan sungguh sesuai dengan tujuan menjalankan usaha tersebut. Hal ini juga agar bantuan dari PT. Pos Indonesia Pekanbaru dapat digunakan dengan sebaik-baiknya oleh pengusaha kecil.

Berikut ini jawaban responden tentang tingkat produksi yang dihasilkan setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari PT. Pos Indonesia

Tabel 9

Nilai Produksi Setelah Mendapatkan Bantuan dari PT. Pos Indonesia

No	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Bertambah	30	78,95
2	Tetap	6	15,79
3	Berkurang	2	5,26
	Jumlah	38	100

Sumber: Hasil Data Olahan

Dari tabel 9 di atas, dapat diketahui bahwa nilai produksi yang dihasilkan oleh pengusaha kecil setelah mendapat bantuan dari PT. Pos Indonesia Pekanbaru, yang mengatakan bertambah adalah 30 responden atau 78,95 % dari jumlah keseluruhan responden, yang mengatakan nilai produksinya tetap adalah 6 responden atau 15,79 % sedangkan yang mengatakan berkurang adalah 2 responden atau 5,26 %. Kesimpulan dari jawaban responden tersebut bahwa nilai produksi setelah mendapatkan bantuan

dari PT. Pos Indonesia Pekanbaru bertambah seiring dengan bertambahnya modal usahanya.

Setelah nilai produksi yang dihasilkan bertambah, tentu saja kondisi usahanya juga ikut mengalami perubahan seiring dengan meningkatnya hasil produksi. Berikut ini adalah tanggapan dari responden tentang kondisi usaha pengusaha kecil setelah menjadi mitra binaan PT. Pos Indonesia Pekanbaru.

Tabel 10

Kondisi Usaha Setelah Menjadi Mitra Binaan PT. Pos Indonesia Pekanbaru

No	Kondisi Usaha	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Makin Berkembang	24	63,16
2	Biasa	11	28,95
3	Tidak Berkembang	3	7,89
	Jumlah	38	100

Sumber : Hasil Data Olahan

Dari tabel 10 diatas dapat diambil keterangan bahwa kondisi usaha pengusaha yang tergabung dalam mitra binaan PT. Pos Indonesia Pekanbaru, yang mengatakan makin berkembang adalah 24 responden atau 63,16 %, dan yang mengatakan kondisi usahanya biasa saja tidak mengalami perubahan adalah 11 responden atau 28,95 % sedangkan yang mengalami kemerosotan dengan kondisi usaha adalah 3 responden atau 7,89 %.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kerjasama melalui program mitra binaan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru bisa dikatakan berjalan dengan lancar karena sebagian dari responden mengatakan bahwa usahanya mulai mengalami perkembangan dengan adanya kerjasama dengan PT. Pos Indonesia Pekanbaru.

Dengan adanya perubahan pada jumlah nilai produksi dan kondisi usaha pengusaha kecil, tentu saja pendapatan yang diperoleh juga mengalami perubahan.

Pendapatan merupakan sasaran dan tujuan akhir yang hendak dicapai oleh setiap usaha adalah selisih antara jumlah penerimaan yang diterima dengan jumlah yang dibayarkan, dalam persaingan sempurna merupakan penjumlahan pembayaran kepada faktor-faktor produksi sesuai dengan produktivitas masing-masing.¹³

Tujuan didirikannya usaha kecil adalah untuk meningkatkan pendapatan, pendapatan itu sendiri diperoleh jika produk yang dihasilkan atau yang dijual tersebut laku terjual. Jika nilai produksi dan kondisi usahanya mengalami perubahan, tentu saja pendapatan pengusaha kecil juga akan mengalami perubahan. Berikut ini tanggapan responden tentang pendapatan yang diperoleh setelah menerima bantuan dari PT. Pos Indonesia Pekanbaru.

Tabel 11

Pendapatan Pengusaha Kecil Setelah Menerima Bantuan dari PT. Pos Indonesia Pekanbaru.

No	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Meningkat	31	81,58
2	Tetap	5	13,16
3	Menurun	2	5,26
	Jumlah	38	100

Sumber: Data Olahan

Dari tabel 11 diatas, dapat diketahui tentang pendapatan pengusaha kecil setelah menerima bantuan dari PT. Pos Indonesia Pekanbaru, pendapatan yang

¹³ Sadono, Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal.34

meningkat ada 31 responden yang menjawab atau 81,58 %, dan yang mengatakan pendapatan tetap tidak mengalami perubahan adalah 5 responden atau 13,16 % sedangkan pendapatan yang cenderung menurun setelah menerima bantuan adalah 2 responden atau 5,26 %. Dilihat dari jawaban responden yang dominan menjawab bahwa pendapatannya terus meningkat seiring dengan perkembangan usahanya maka bantuan yang disalurkan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru sangat membantu pengusaha kecil.

Kerjasama yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru dengan pengusaha kecil dalam bentuk bantuan modal usaha melalui sistem kredit atau pinjaman serta dalam bentuk binaan, bimbingan serta pelatihan yang diadakan oleh PT. Pos Indonesia. Pengusaha kecil yang telah menerima bantuan modal dari PT. Pos Indonesia Pekanbaru juga diberi bekal seperti bimbingan dan arahan dari Unit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) tentang bagaimana cara mengembangkan usaha agar lebih maju dan berkembang dan juga agar modal yang telah disalurkan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru benar-benar digunakan untuk mengembangkan usahanya.

Bimbingan yang diberikan dari PT. Pos Indonesia Pekanbaru seperti meninjau lokasi usaha bagi mitra binaannya, tujuannya untuk mengetahui apakah usaha mitra binaannya dengan tambahan modal usaha berkembang dengan baik atau tidak, juga dengan mengadakan seminar atau pertemuan antara pengusaha kecil yang tergabung dalam mitra binaan PT. Pos Indonesia Pekanbaru yang membahas tentang bagaimana cara untuk menjalankan usaha yang dikelola dapat berjalan dengan baik dan mendatangkan keuntungan yang maksimal. Pertemuan ini biasanya menghadirkan Departemen Koperasi dan UKM atau Departemen Tenaga Kerja yang bekerjasama

dengan PT. Pos Indonesia Pekanbaru sebagai narasumber untuk menjelaskan tentang usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk menjalankan usahanya.¹⁴

Dengan menjadi mitra binaan PT. Pos Indonesia Pekanbaru, diharapkan kepada pengusaha kecil agar dapat mengembangkan usahanya karena selain diberi bantuan modal usaha, pengusaha kecil juga dibekali pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana mengelola usaha dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Berikut ini tanggapan dari responden tentang perkembangan usahanya setelah mendapatkan binaan dan bimbingan dari PT. Pos Indonesia Pekanbaru.

Tabel 12

Binaan yang Diberikan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru dalam Membantu Mengembangkan Usaha Mitra Binaan

No	Binaan yang diberikan PT. Pos Indonesia Pekanbaru	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1	Kunjungan Ke Lokasi Usaha	32	84,21
2	Seminar Usaha	6	15,79
3	Pelatihan dan Keterampilan	-	-
	Jumlah	38	100

Sumber: Data Olahan

Dari keterangan tabel 12 di atas, binaan yang diberikan PT. Pos Indonesia Pekanbaru kepada pengusaha kecil mitra binaannya dalam membantu pengembangan usaha kecil sebagian besar jumlah responden mengatakan hanya melakukan kunjungan ke lokasi usaha saja tanpa ada binaan lainnya yaitu sebanyak 32 orang atau sebesar 84,21 % dari jumlah responden yang ada. Sedangkan yang mengikuti seminar usaha hanya sebanyak 6 orang atau 15,79 % saja.

¹⁴ Tamsir, Bakri, *Loc. cit.*,

Tabel 13

Berapa kali PT. Pos Indonesia Pekanbaru Memberikan Pembinaan Kepada Mitra Binaannya

No	Jawaban Responden	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sekali Dalam 3 Bulan	5	13,16
2	Hanya Sekali Dalam Waktu Peminjaman	29	76,32
3	Tidak Pernah Sama Sekali	4	10,52
	Jumlah	38	100

Sumber : Data Olahan

Dari tabel 13 di atas, dapat diketahui berapa kali PT. Pos Indonesia Pekanbaru memberikan pembinaan kepada mitra binaannya dalam masa peminjaman. Yang diberi pembinaan dalam masa 3 bulan sekali sebanyak 5 orang atau 13,16 %, yang hanya diberikan pembinaan dalam sekali masa peminjaman sebanyak 29 orang atau 76,32 %. Sedangkan yang tidak pernah diberikan arahan dan binaan sama sekali dalam masa peminjaman di PT. Pos Indonesai Pekanbaru adalah 4 orang atau 10,52 %. Dari jawaban responden diketahui bahwa sangat kecil sekali campur tangan PT. Pos Indonesia Pekanbaru dalam membantu mengembangkan usaha mitra binaannya karena hanya dalam waktu sekali saja memberikan pembinaan dan mengawasi jalannya usaha yang dilakukan oleh mitra binaan.

Tabel 14

Binaan dan Bimbingan PT. Pos Indonesia Pekanbaru Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Mitra Binaan

No	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Terbantu	10	26,32
2	Terbantu	26	68,42
3	Tidak Terbantu	2	5,26
	Jumlah	38	100

Sumber: Data Olahan

Dari tabel 14 di atas menunjukkan bahwa binaan yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru adalah yang mengatakan sangat terbantu 10 responden atau 26,32 %, yang mengatakan terbantu adalah 26 responden atau 68,42 % sedangkan yang mengatakan tidak terbantu adalah 2 responden atau 5,26 %. Jadi sebagian besar responden dominan mengatakan bahwa binaan dan bimbingan yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru dalam membantu pengusaha kecil mengembangkan usahanya adalah terbantu.

Peran pemerintah dalam mengembangkan usaha kecil sangat banyak, dilihat dari bentuk pembinaan melalui Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan baik dengan pola Bapak angkat, subkontrak, hubungan kerjasama, sistem inti plasma maupun pemberian bantuan dalam bentuk modal yang semuanya itu ditujukan untuk kemandirian usaha kecil. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan kepada perusahaan besar atau BUMN untuk membantu pengusaha kecil, namun sepertinya langkah ini belum begitu menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Artinya bukan PT. Pos Indonesia Pekanbaru sebagai perusahaan BUMN tidak melaksanakan program pemerintah tentang peraturan yang mengharuskan untuk

memberikan bantuan berupa modal dan pembinaan untuk pengusaha kecil dalam bentuk kerjasama, PT. Pos Indonesia Pekanbaru memang telah merealisasikan bantuan berupa bantuan kepada pengusaha kecil dalam rangka membantu usahanya, namun bantuan yang diberikan hanya berupa dana saja seperti yang diberikan oleh perbankan atau lembaga-lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kredit, pembinaan dan pelatihan yang seharusnya juga diberikan tidak seoptimal seperti yang telah direncanakan agar usaha kecil dapat berkembang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Setiap usaha baik besar maupun kecil tidak terlepas dari manusia atau tenaga kerja dalam menjalankan aktivitasnya. Hanya apabila dilihat dari penggunaan peralatan dan teknologi yang digunakan sangatlah bertolak belakang dengan tenaga kerja yang dipakai. Karena teknologi yang canggih juga memerlukan tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman dibidangnya dan selebihnya digunakan sebagai tenaga pembantu.

Mitra binaan PT. Pos Indonesia Pekanbaru umumnya skala usahanya masih kecil dan teknologi serta peralatan yang digunakan masih sederhana. Tenaga kerja yang digunakan umumnya berasal dari anggota keluarga sendiri atau keluarga dekat dan selebihnya dari anggota keluarga luar.

Dengan berkembangnya usaha dan meningkatnya produksi tentu saja memerlukan tenaga tambahan untuk lebih memperlancar produktivitas, berikut ini berdasarkan data tentang perubahan tenaga kerja setelah menjadi mitra binaan PT. Pos Indonesia Pekanbaru.

Tabel 15

Jumlah Tenaga Kerja Setelah Menjadi Mitra Binaan PT. Pos Indonesia Pekanbaru

No	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Bertambah	13	34,21
2	Tetap	22	57,89
3	Berkurang	3	7,90
	Jumlah	38	100

Sumber: Data Olahan

Dari tabel 15 di atas, menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang digunakan pengusaha kecil setelah menjadi mitra binaan PT. Pos Indonesia Pekanbaru, yang mengatakan bertambah adalah 13 responden atau 34,21 %, tetap adalah 22 responden atau 57,89 % sedangkan yang mengatakan berkurang adalah 3 responden atau 7,90 %. Dominan jawaban responden mengatakan jumlah tenaga kerjanya tetap setelah menjadi mitra binaan PT. Pos Indonesia dan bantuan serta binaan yang diberikan tidak berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerjanya.

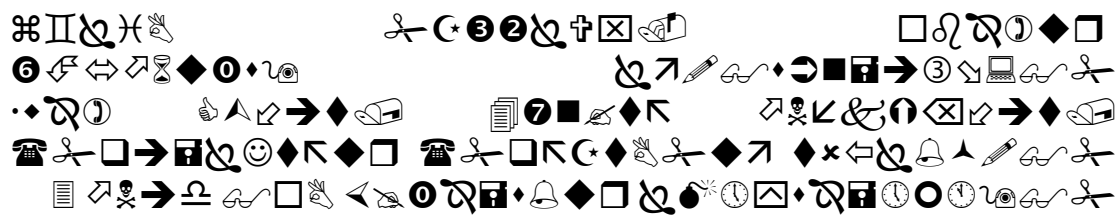
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kemitraan PT. Pos Indonesia Pekanbaru Dalam Membina Usaha Kecil Mitra Binaan

Kunci keberhasilan dalam memberikan peluang untuk meningkatkan peran usaha kecil adalah melalui program kemitraan dimana pemerintah indonesia dalam hal ini Presiden telah mencanangkan program kemitraan pada tanggal 14 januari 1991. Program kemitraan melalui keterkaitan Bapak Angkat dan mitra usaha tersebut

mengatur hubungan kerjasama keterkaitan antara usaha besar dan usaha menengah dengan usaha kecil.¹⁵

Jadi kemitraan itu merupakan bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan sesuatu dengan prinsip saling membutuhkan, saling memerlukan dan saling menguntungkan. Kerjasama dalam istilah Islam disebut *syirkah*. Syirkah menurut istilah artinya campur atau percampuran.¹⁶ Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Syirkah adalah perserikatan antara dua orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk meraih keuntungan.

Al-Qur'an Surat Shad ayat :24¹⁷



Artinya : “ *Sesungguhnya kebanyakan dari orang –orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh dan amat sedikitlah mereka ini*”. (QS. Surat Shaad : 2)

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru kepada pengusaha kecil mitra binaan adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha. Dalam Islam, memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan diperintahkan

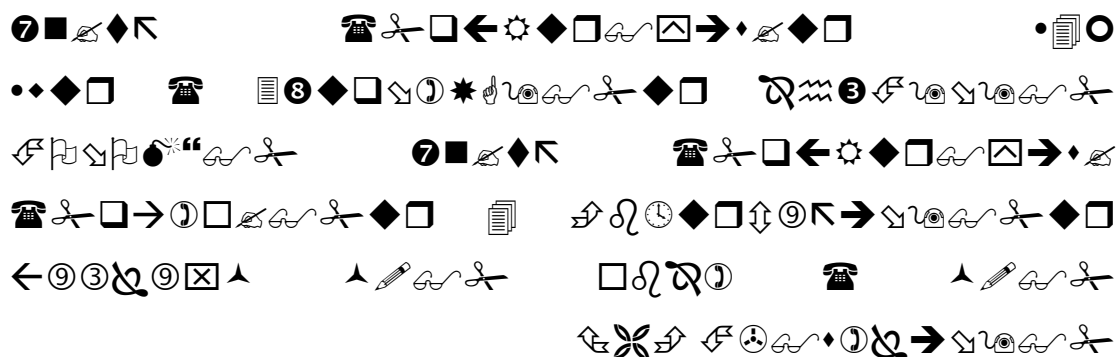
¹⁵ James dan Akasane, *Aspek-aspek finansial usaha kecil dan menengah*, (Jakarta: LP3ES, 1993), hal. 20

¹⁶ Hendi, Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2007), hal. 125

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Toha Putra, , 2002), hal. 650

dalam Al-Qur'an. Islam menganjurkan untuk memilih kehidupan dunia yang berdimensi akhirat. Dengan pilihan ini, maka seseorang akan mendapat tidak hanya kebaikan dalam kehidupan dunia yang pasti akan menjadi kebahagiaan di akhirat kelak. Inilah arti dari bekerja itu adalah ibadah, berdagang itu adalah ibadah dan tolong menolong terhadap sesama adalah ibadah dan seterusnya. Apabila hal tersebut dikerjakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Swt. Berkaitan dengan tolong menolong kepada sesama , sesuai dengan Firman

Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat:2



Artinya :*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Surat Al-Maidah:2).*¹⁸

Program kemitraan yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru melalui pemberian pinjaman berupa modal usaha dibolehkan dalam Islam, bahkan sangat dianjurkan sebagai landasan tolong menolong terhadap sesama umat manusia dengan tujuan saling membantu, saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

Namun, pinjaman melalui bentuk kemitraan dan kerjasama oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru dengan menerapkan sistem bunga. Telah ditegaskan bahwa bunga dalam pinjaman tidak diperbolehkan dalam aturan syari'ah dan diharamkan

¹⁸ Departemen RI, *Op cit.*, hal. 157

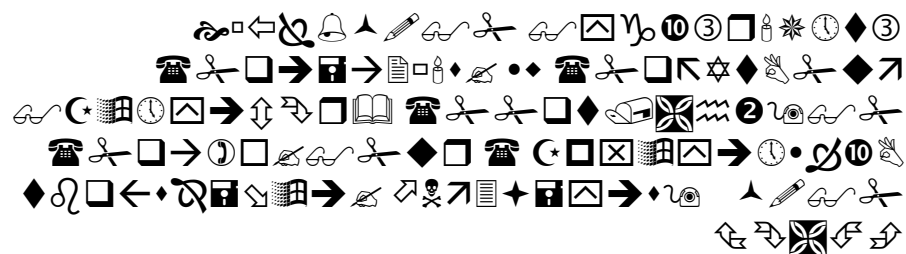
dalam Islam. Menetapkan bunga sama halnya dengan *riba* yaitu melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah ayat 275 :



Artinya :*“Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”*. (QS. Al-Baqarah:275).¹⁹

Surat Ali Imran ayat 130 :



Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba secara berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan”*. (QS. Ali Imran: 130)²⁰

Jadi sistem kemitraan yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru ini dibolehkan dalam Islam, karena dengan adanya kemitraan dan kerjasama dari PT. Pos Indonesia Pekanbaru, usaha mitra binaan mengalami peningkatan dan perkembangan ke arah yang lebih baik sehingga pengusaha kecil terbantu perekonomiannya. Oleh karena itu, kemitraan PT. Pos Indonesia Pekanbaru berjalan sesuai dengan prinsip dan aturan Islam yang bertujuan untuk memaslahatkan dan mensejahterakan umat manusia. Namun, yang perlu diperbaiki dan diubah dari sistem kerjasama dan

¹⁹ *Ibid.*, hal. 69

²⁰ *Ibid.*, hal. 97

kemitraan PT. Pos Indonesia Pekanbaru adalah pemberian pinjaman dengan bunga menjadi pembiayaan dengan sistem bagi hasil.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- a. PT. Pos Indonesia Pekanbaru merealisasikan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan pola Bapak-Anak Angkat, dimana PT. Pos Indonesia Pekanbaru memberikan bantuan berupa modal usaha serta bimbingan dan binaan tentang pengelolaan usaha yang dijalankan oleh mitra binaannya. Bimbingan dan binaan yang diberikan adalah melakukan pengawasan, memberikan pengarahan dan pembinaan terhadap usaha mitra binaan.
- b. Implikasi dari kerjasama yang dilakukan PT. Pos Indonesia Pekanbaru dengan pengusaha kecil membawa hasil yang memuaskan karena dengan adanya bantuan dari PT. Pos Indonesia Pekanbaru pengusaha kecil merasa terbantu dalam pengembangan usahanya terutama dengan masalah modal usaha, yang dulunya sebelum menjadi mitra usaha PT. Pos Indonesia Pekanbaru usahanya sulit untuk dikembangkan sekarang setelah menjadi mitra binaan PT. Pos Indonesia Pekanbaru usahanya mengalami peningkatan dan perubahan sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan.
- c. Menurut tinjauan ekonomi Islam, kemitraan yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru dalam membina usaha kecil mitra binaan dibolehkan dalam Islam, malah dianjurkan dengan prinsip tolong menolong. Asalkan

kemitraan yang dilakukan tersebut memegang prinsip saling membantu, saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

B. Saran

- a. Diharapkan kepada PT. Pos Indonesia Pekanbaru lebih aktif dalam Mensosialisasikan Program Kemitraan kepada masyarakat sehingga dapat diketahui dan dimengerti serta dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat karena program ini baik untuk membantu usaha kecil dan menengah dalam meningkatkan usahanya
- b. Untuk ke depannya, diharapkan agar PT. Pos Indonesia Pekanbaru bisa mengubah sistem kemitraan melalui penyaluran pinjaman atau kredit dengan sistem kemitraan sesuai dengan syari'at Islam yaitu sistem bagi hasil mudharabah yang tidak lagi menerapkan sistem bunga tetapi menggunakan prinsip bagi hasil yang dihalalkan dalam Islam.
- c. Diharapkan dari kerjasama yang dilakukan PT. Pos Indonesia Pekanbaru ini dapat menarik minat dan menumbuhkan semangat kewirausahaan bagi pelaku ekonomi lainnya sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan agar kemiskinan dan pengangguran sedikit demi sedikit bisa teratasi.
- d. Kepada pengusaha kecil yang menjadi mitra binaan PT. Pos Indonesia Pekanbaru agar dapat menggunakan bantuan yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya agar PT. Pos Indonesia Pekanbaru memberikan rasa kepercayaan untuk menyalurkan kembali bantuannya apabila itu diperlukan oleh pengusaha kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Z. Fachri Yasin,dkk,2001, *Petani, Usaha Kecil dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan*, Penerbit : Unri Press,2001,Pekanbaru
- Asy-syaukani, Imam, 2006, *Ringkasan Nailul Authar*, Penerbit : Pustaka Azzam, Jakarta
- Christian Lampelius, Gert Thoma, 1979, *Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat Pendekatan Kebutuhan Pokok*, Penerbit : LP3ES-, Jakarta
- Departemen Agama RI, 2002, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Penerbit : PT. Toha Putra, Semarang
- Hafsah,Jafar Muhammad, 2000, *Kemitraan Usaha*, Penerbit : Sinar Harapan, Jakarta
- Hakim,Abdul,2002, *Ekonomi Pembangunan*, Penerbit: Ekonisa, Yogyakarta
- Hasan, Ali,M, 2000, *Masail Fiqhiyah Zakat,Pajak,Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada-, Jakarta
- Hadinoto,Surtanto, 2005, *Kunci Sukses Bisnis Kredit Mikro*, Penerbit : PT.Elex Media Komputindo, Jakarta.
- James dan Akrasane, 1993, *Aspek-aspek finansial usaha kecil dan menengah*, Penerbit : LP3ES, Jakarta
- Jeane Neltje Saly, 2001, *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing dalam Perspektif Perdagangan Internasional*, Penerbit : Badan Pembinaan Hukum Nasional,Jakarta
- Kasmir,SE,MM, 2006, *Kewirausahaan*, Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kuncoro,Mudrajad,Prof, 2007, *Ekonomika Industri Indonesia*, Penerbit : CV.Andi, Yogyakarta
- _____, 2002, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi edisi I*, Penerbit : BPFE- Yogyakarta.
- Maryoto, Rahmat, 1991, *Serikat Pekerja Pengusaha dan Kesepakatan Kerja Bersama*, Penerbit : Fikahati Aneska-, Jakarta

- M. Sholahuddin, S.E., M.Si, 2007, *Asas- asas Ekonomi Islam*, Penerbit : Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rivai, Veithzal, 2006, *Kredit Manajemen Handbook*, Penerbit : Raja Wali Press, Jakarta
- Sihombing,Kilian, 1994, *Evaluasi dan Arah Kebijaksanaan Kredit Usaha Kecil Diindonesia(Kumpulan Essai)*, Penerbit : PLM.FEUI, Jakarta.
- Sunarto,SE,MM, 2003, *Pengantar Bisnis*, Penerbit:AMUS,Yogyakarta
- Sadono,Sukirno, 2004, *Pengantar Bisnis, edisi I*, Penerbit : Kencana, Jakarta
- Saydam,Gauzali, 2006, *Panduan Lengkap Pengantar Bisnis Dalam Telaah Tanya Jawab*, Penerbit : ALFABETA, Bandung
- Sumarni,Murti, 1998, *Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan)*, Penerbit : Liberty, Yogyakarta
- Suhendi, Hendi, 2007, *Fiqh Muamalah*, Penerbit : Raja Grafindo Persada-, Jakarta
- Subanar, 1997, *Manajemen Usaha Kecil*, Penerbit : BPFE, Yogyakarta
- Suryana, 2003, *Kewirausahaan (pedoman praktis :kiat dan proses menuju sukses)*, Penerbit : Salemba Empat-, Bandung
- Suyatno, Thomas,Drs,dkk, 2003, *Dasar-Dasar Perkreditan edisi IV*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta
- Tarmudji,Tarsisi,Drs,1996, *Prinsip-Prinsip Wirausaha*, Penerbit : Liberty,Yogyakarta
- Tambuan, Tulus, 2001, *Perekonomian Indonesia*, Penerbit : Ghalia Indonesia-, Jakarta
- Wijaya, Faried,Dr.M,MA, 2005, *Perkreditan,Bank dan Lembaga-Lembaga keuangan edisi I*, Penerbit : BPFE-, Yogyakarta.
- Zulkarnain, 2006, *Kewirausahaan”Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Penduduk Miskin”*, Penerbit : Adicita-, Yogyakarta

DAFTAR TABEL

TABEL 1	Jumlah Pengusaha Kecil Mitra Binaan PT. Pos Indonesia Pekanbaru Tahun 2004-2008.....	47
TABEL 2	Data tentang jenis Sektor Usaha Kecil Mitra Binaan PT. Pos Indonesia Pekanbaru tahun 2004-2008	48
TABEL 3	Data Responden Pengusaha Kecil Mitra Binaan PT. Pos Indonesia Pekanbaru tahun 2008.....	49
TABEL 4	Tanggapan besar pinjaman yang disalurkan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru kepada Pengusaha Kecil Mitra Binaan.....	58
TABEL 5	Tanggapan mengenai prosedur dan persyaratan peminjaman yang Ditetapkan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru.....	60
TABEL 6	Jangka waktu pembayaran angsuran PT. Pos Indonesia Pekanbaru..	61
TABEL 7	Tanggapan tentang suku bunga yang ditetapkan PT. Pos Indonesia Pekanbaru.....	63
TABEL 8	Sumber Informasi tentang pinjaman kredit PT. Pos Indonesia Pekanbaru.....	65
TABEL 9	Tanggapan nilai produksi setelah mendapatkan bantuan dari PT. Pos Indonesia Pekanbaru.....	66
TABEL 10	Kondisi usaha setelah menjadi mitra binaan PT. Pos Indonesia Pekanbaru.....	67
TABEL 11	Pendapatan pengusaha kecil setelah menjadi mitra binaan PT. Pos Indonesia Pekanbaru.....	69
TABEL 12	Binaan yang diberikan PT. Pos Indonesia Pekanbaru dalam membantu mengembangkan usaha kecil mitra binaan.....	71
TABEL 13	Berapa kali PT. Pos Indonesia Pekanbaru memberikan pembinaan kepada mitra binaannya.....	72
TABEL 14	Pembinaan dan bimbingan yang dilakukan PT. Pos Indonesia Pekanbaru terhadap perkembangan usaha mitra binaan.....	73
TABEL 15	Jumlah tenaga kerja setelah menjadi mitra binaan PT. Pos Indonesia Pekanbaru.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gambar Struktur Organisasi PT. Pos Indonesia Pekanbaru.....	26
---	----

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana bentuk kerja sama yang dilakukan PT. Pos Indonesia Pekanbaru dengan mitra binaannya?
2. Apa yang dilakukan PT. Pos untuk membantu pengusaha kecil dalam mengelola dan mengembangkan usahanya?
3. Binaan seperti apa yang diberikan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru kepada pengusaha kecil?
4. Bagaimana kriteria pengusaha kecil yang dijadikan mitra usaha oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru?
5. Menurut PT. Pos Indonesia Pekanbaru apakah binaan yang diberikan bisa membawa perubahan bagi pengusaha kecil kearah yang lebih baik?

KUESIONER

I. PENGANTAR

Kepada Yth:

Bapak/ Ibu/ Sdr./ i/ Responden

Di tempat

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan Tugas Akhir (TA) Pendidikan Sarjana Strata S1, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

“IMPLIKASI KERJASAMA PT. POS INDONESIA PEKANBARU DENGAN PENGUSAHA KECIL MITRA BINAAN MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM”.

Saya sangat memahami bahwa waktu Bapak/ Ibu/ Sdr/ i/ sangatlah terbatas dan berharga, namun saya sangat mengharapkan kesediaannya untuk membantu penelitian saya ini dengan mengisi pertanyaan-pertanyaan dibawah ini:

II. PETUNJUK

Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan anda saat ini dan berilah tanda silang (X) pada jawaban tersebut.

1. Berapakah jumlah pinjaman yang diterima oleh Pengusaha Kecil Mitra Binaan yang diberikan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru?
 - a. Rp. 5.000.000 – Rp. 9.000.000,-
 - b. Rp. 10.000.000 – Rp. 30.000.000,-
 - c. Rp. 50.000.000 ke atas

2. Bagaimana menurut Saudara/I tentang prosedur peminjaman di PT. Pos Indonesia Pekanbaru?
 - a. Sangat Mudah
 - b. Sedang
 - c. Sulit
3. Berapa lama jangka waktu pembayaran kredit atau pinjaman yang disalurkan PT. Pos Indonesia Pekanbaru?
 - a. 1 Tahun
 - b. 1 – 3 Tahun
 - c. 3 Tahun ke atas
4. Bagaimana pendapat Saudara/I tentang suku bunga yang ditetapkan oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru dalam menyalurkan kreditnya?
 - a. Tinggi
 - b. Sedang
 - c. Rendah
5. Darimana Saudara/I memperoleh informasi tentang adanya mitra binaan di PT. Pos Indonesia Pekanbaru?
 - a. Media Elektronik
 - b. Marketing PT. Pos Indonesia Pekanbaru
 - c. Masyarakat
6. Bagaimana tingkat produk yang Saudara/I hasilkan setelah adanya kerjasama dari PT. Pos Indonesia Pekanbaru?
 - a. Bertambah
 - b. Tetap
 - c. Berkurang
7. Bagaimana kondisi usaha Saudara/I setelah menjadi Mitra PT. Pos Indonesia Pekanbaru?
 - a. Makin Berkembang
 - b. Biasa
 - c. Tidak Berkembang
8. Bagaimana pendapatan yang Saudara/I peroleh setelah menerima bantuan dari PT. Pos Indonesia Pekanbaru?
 - a. Meningkatkan
 - b. Tetap

c. Menurun

9. Binaan seperti apa yang diberikan PT. Pos Indonesia Pekanbaru kepada Saudari/I dalam hal membantu mengembangkan usaha anda?

- a. Kunjungan Ke Lokasi Usaha
- b. Seminar Usaha
- c. Pelatihan dan Keterampilan

10. Berapa kali PT. Pos Indonesia Pekanbaru memberikan pembinaan terhadap usaha yang Saudara/I jalankan?

- a. Sekali Dalam 3 Bulan
- b. Sekali Dalam Masa Peminjaman
- c. Tidak Pernah Sama Sekali

11. Apakah binaan dan pelatihan yang diberikan oleh PT. Pos Indonesi Pekanbaru dapat membantu Saudara/I dalam mengembangkan usaha anda?

- a. Sangat Terbantu
- b. Terbantu
- c. Tidak Terbantu

12. Bagaimana jumlah tenaga kerja Saudara/I setelah menjadi mitra binaan dari PT. Pos Indonesia Pekanbaru?

- a. Bertambah
- b. Tetap
- c. Berkurang

BIODATA PENULIS

Penulis bernama Dyah Ratna Ningsih lahir di Sejangat Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis pada tanggal 20 September 1988, dilahirkan sebagai anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Slamet dan Ibu Sutarmi.

Adapun riwayat pendidikan yang telah penulis tempuh adalah pada tahun 1993, penulis memasuki jenjang pendidikan dasar di SD N 046 Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dan tamat pada tahun 1999, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SLTP N 1 Bukit Batu tamat pada tahun 2002 kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMA N 1 Bukit Batu dan tamat pada tahun 2005. Pada tahun 2005 penulis mengikuti test ujian diterima sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

Pada tanggal 23 Maret 2010, penulis mengikuti ujian skripsi dan dinyatakan lulus.